



**PERUBAHAN KELEMBAGAAN NELAYAN RUMPON DAN
DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN NELAYAN
TPI PANCER DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN
PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI**

*Institutional Changes Rumpon's Fisherman and The Impact on Welfare of TPI
Pancer Fishermen on Sumber Agung Village at Pesanggaran District
In Banyuwangi Regency*

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Ekonomi dan Mencapai gelar Magister Ilmu Ekonomi

Oleh

**EDY WIDIANTORO, S.Pi
NIM.140820201006**

**MAGISTER ILMU EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PERUBAHAN KELEMBAGAAN NELAYAN RUMPON DAN
DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN NELAYAN
TPI PANCER DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN
PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI**

*Institutional Changes Rumpon's Fisherman and The Impact on Welfare of TPI
Pancer Fishermen on Sumber Agung Village at Pesanggaran District
In Banyuwangi Regency*

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Ekonomi dan Mencapai gelar Magister Ilmu Ekonomi

**EDY WIDIANTORO, S.Pi
NIM. 140820201006**

**MAGISTER ILMU EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini disetujui

Tanggal : Oktober 2016

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Siswoyo Hari Santosa, S.E. M.Si

NIP: 19680715993031001

Pembimbing Anggota

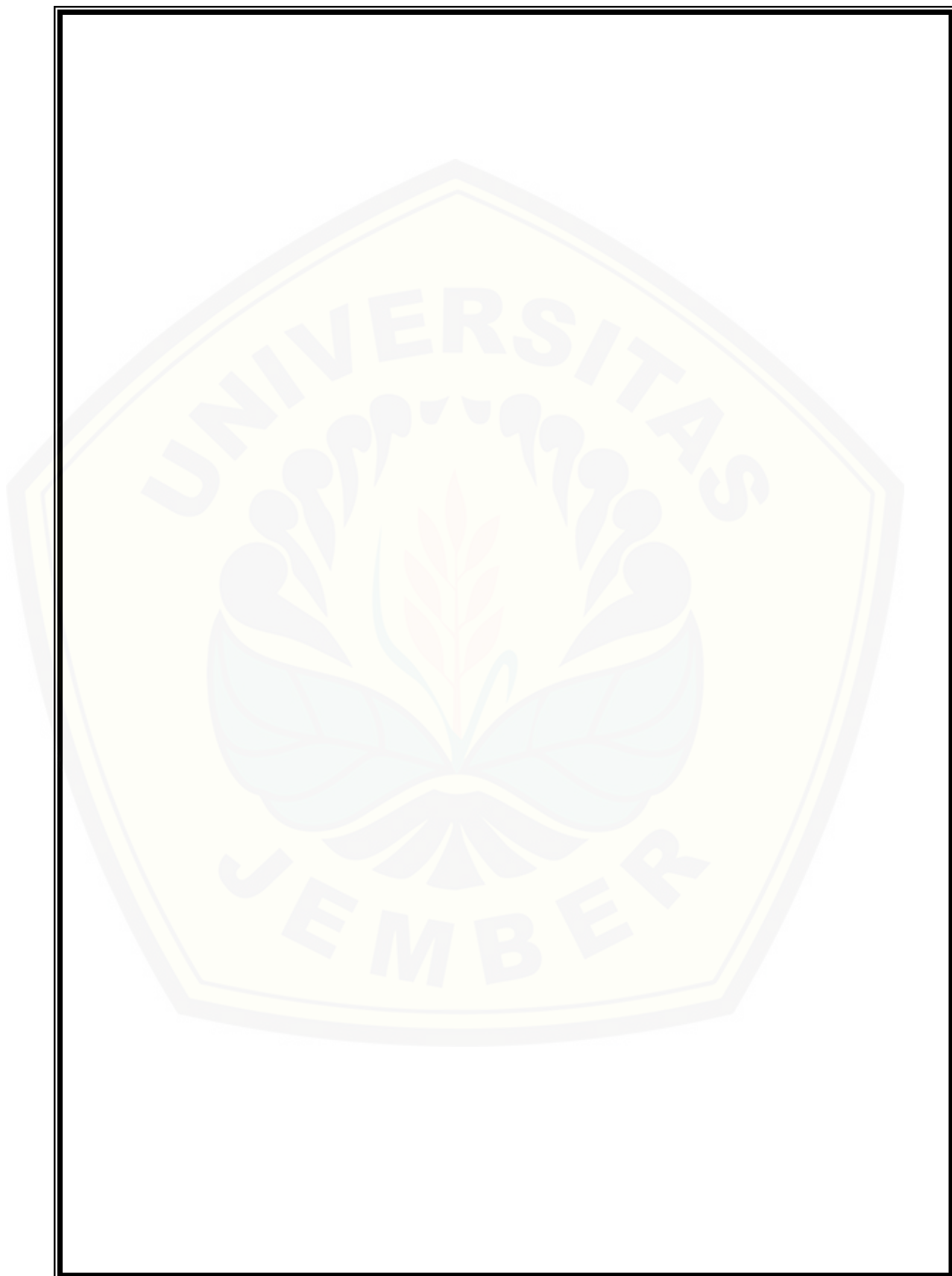
Dr. Siti Komariyah, SE, MSi

NIP. 19710610 20012 2 002

Mengetahui
Pascasarjana Universitas Jember
Program Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Siti Komariyah, SE, MSi

NIP. 19710610 20012 2 002



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edy Widiantoro, S.Pi

NIM : 140820201006

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Perubahan Kelembagaan Nelayan Rumpon dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan TPI Pancer di Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2016

Yang menyatakan,



Edy Widiantoro, S.Pi.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Ayah, ibu dan mertuaku terima kasih atas segala doa dan pengorbanan yang diberikan selama ini
2. Istriku Deny Sri Rahayu yang telah memberikan dorongan spirit dan materi serta pengorbanan.
3. Anaku-anaku Jasmine Fazrin Widi Putri dan Gabriel Oktavio Widi Putra yang turut membantu doa dan juga spirit.
4. Teman-temanku Magister Imu Ekonomi Angkatan 2014
5. Almamaterku Tercinta.

HALAMAN MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan akan tetapi bernilai sesudah dikerjakan”

Aristoteles

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”

Lessing

“Perikanan Maju, Laut Lestari, Nelayan Sejahtera”

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan kelembagaan nelayan dalam ketebaharuan teknologi rumpon nelayan tangkap TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi; untuk mengetahui pengaruh teknologi rumpon terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di perairan Pesanggaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya untuk meningkatkan derajat kepercayaan data menggunakan keabsahan data. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan nelayan dalam ketebaharuan teknologi rumpon nelayan tangkap TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dijelaskan dengan perubahan struktur sosial yang ada dikomunitas nelayan disini maksudnya adalah sebuah susunan sosial yang didasarkan pada pola hubungan sosial antara para aktor yang bergerak dalam kehidupan laut. Struktur sosial komunitas nelayan TPI Pancer dibedakan berdasarkan pada alat produksi/ armada yang digunakan. Dampak ketebaharuan teknologi rumpon terhadap tingkat kesejahteraan nelayan tangkap TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dimana teknologi rumpon (*rumpungan*) mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dari pada nelayan sebelum menggunakan teknologi. Walaupun demikian penghasilan nelayan Rumpungan dirasa cukup untuk memenuhi keperluan keluarga.

Kata kunci: perubahan, kelembagaan, nelayan, rumpon dan teknologi

ABSTRACT

The purpose of this study were to assess Institutional Changes Rumpon's Fisherman and The Impact on Welfare of TPI Pancer Fishermen on Sumber Agung Village at Pesanggaran District In Banyuwangi Regency; to determine the effect of Rumpon technology to the level of welfare of fishermen in the waters Pesanggaran. This research were a qualitative descriptive study. The unit of analysis in this study were TPI Pancer Sumber Agung village at Pasanggaran District of Banyuwangi. The data used in this research were primary and secondary data. In qualitative research is basically to increase the degree of confidence in the validity of the data using the data. The results of data analysis showed that the institutional changes fisherman in rumpon technology at fishermen catch TPI Pancer Sumber Agung village at Pasanggaran District of Banyuwangi explained by changes in social structures that exist in the community of fishermen here means a social order based on the pattern of social relationships among actors engaged in sea life. The social structure of fishing communities TPI Pancer differentiated based on production equipment/fleet use. Impact of rumpon technology to the level of welfare of fishermen catching TPI Pancer Sumber Agung subdistrict Pesanggaran Banyuwangi where rumpon technology (rumpungan) had a better economic level of the fishermen before use technology. Nevertheless Rumpungan fisherman's income was considered sufficient to meet family needs.

Keywords: change, institutional, fishermen, FADs and technology

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT serta hidayahNya, yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan Tesis ini. Penyusunan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi S-2 (Magister Ilmu Ekonomi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Selain itu, dalam penulisan Tesis ini banyak pihak yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung. Sebagai ungkapan bahagia, maka pada kesempatan ini penulis mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

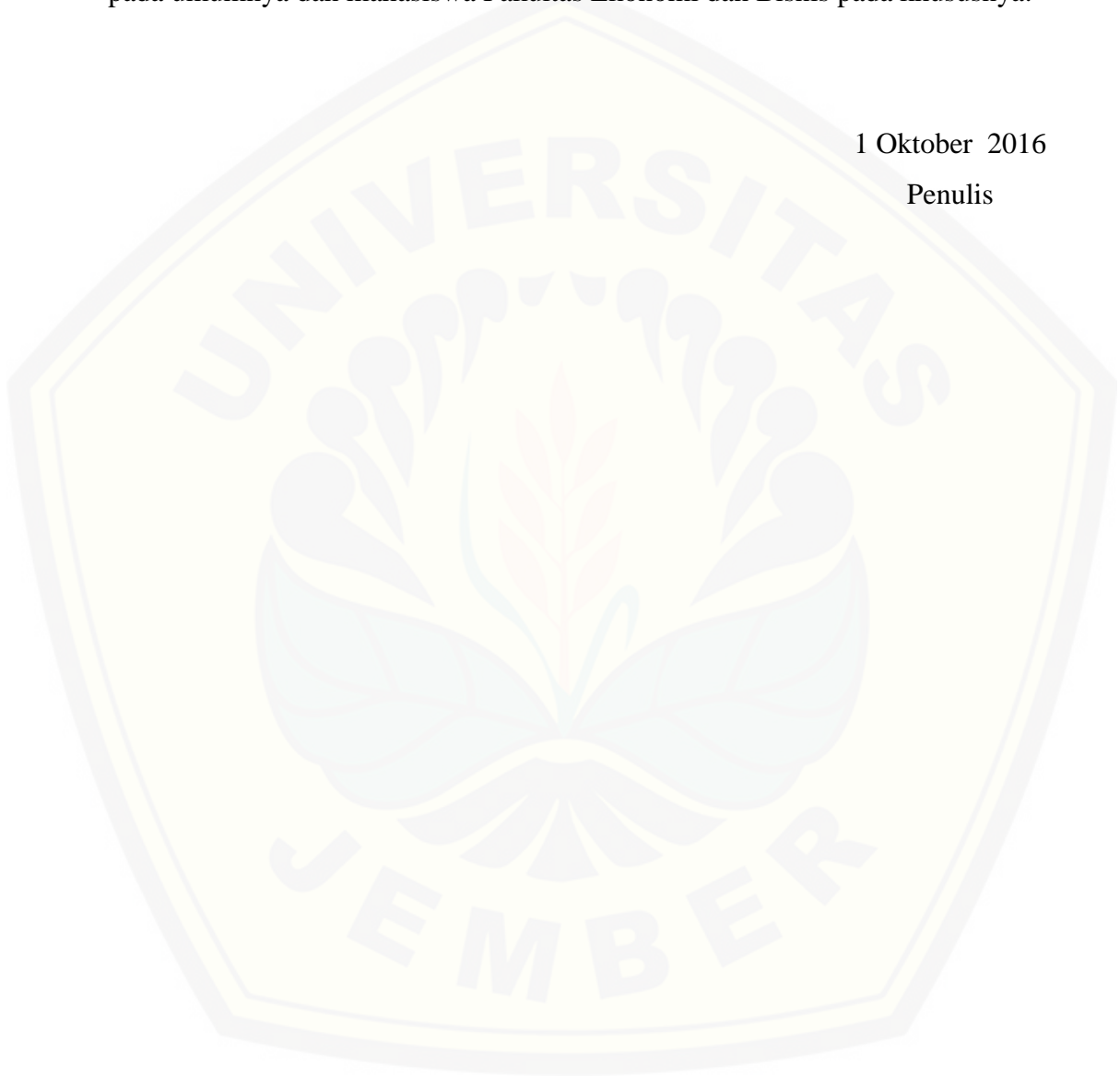
1. Dr. Siswoyo Hari Santosa, S.E. M.Si selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
2. Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan selaku pembimbing anggota yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
5. Teman – temanku angkatan 2014
6. Almarhum Bapak Subyakto FS, SP sebagai informan dan teman sejawat yang membantu terselesaikannya tesis ini.
7. Seluruh pihak yang membantu semangat dan dorongan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, maka disadari sepenuhnya tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan.

Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat dan guna bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada khususnya.

1 Oktober 2016

Penulis

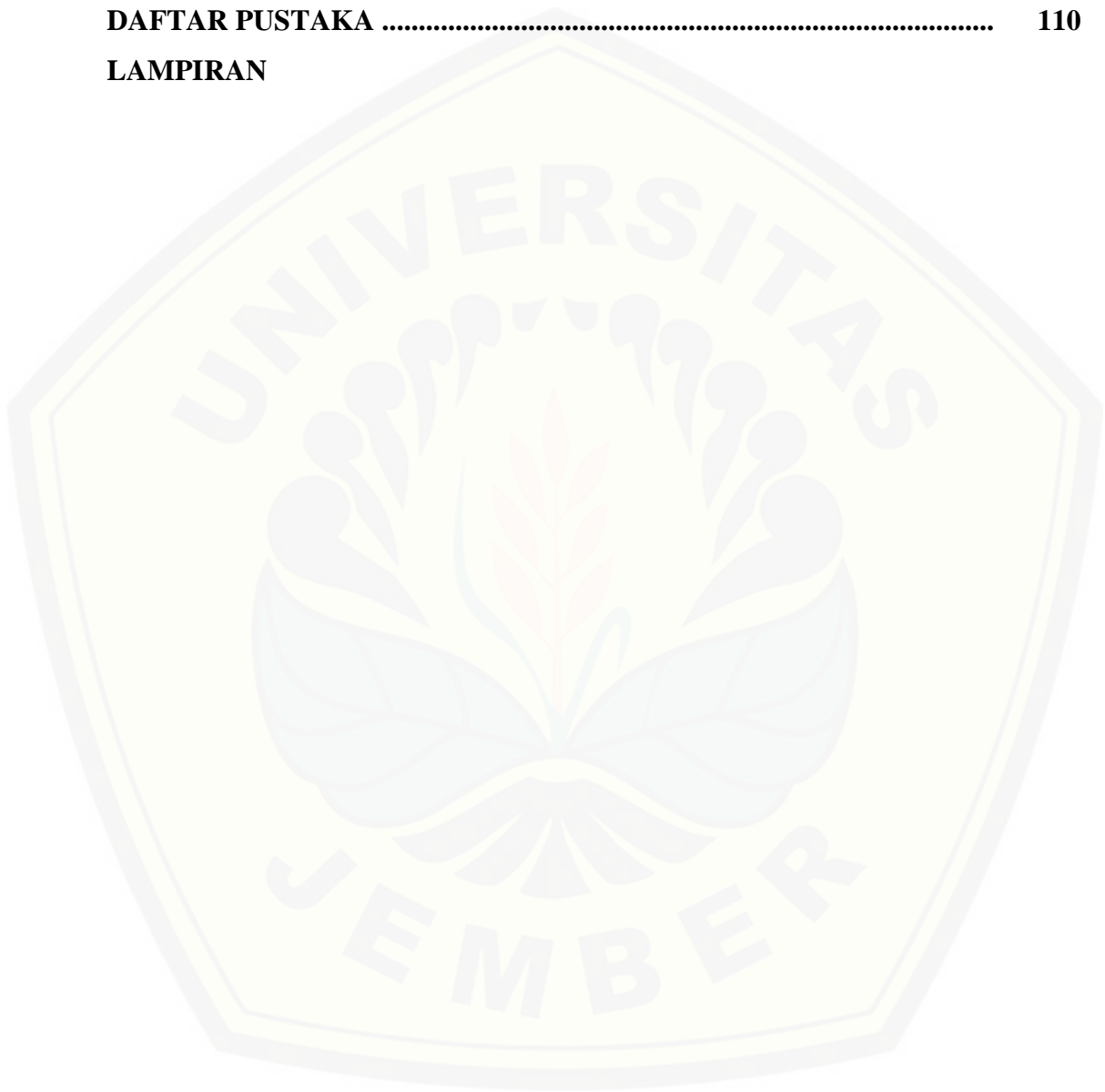


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Ekonomi Kelembagaan	10
2.1.2 Teori Kesejahteraan	13
2.1.3 Perikanan Tangkap	20
2.1.4 Sifat Perikanan	21
2.1.5 Tehnologi Rumpon	22

2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran	30
BAB 3. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Unit Analisis	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Metode Penentuan Informan	33
3.5 Metode Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.7 Teknik Keabsahan Data	36
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.1 Perkembangan Perekonomian Kabupaten Banyuwangi	38
4.1.2 Perkembangan Perekonomian Kecamatan Pesanggaran	47
4.2 Perubahan Kelembagaan Nelayan Dalam Ketebaharuan Tehnologi Rumpon Nelayan Tangkap TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.....	52
4.2.1 Struktur Sosial Komunitas Nelayan Adanya Ketebaharuan Tehnologi Rumpon	52
4.2.2 Pola dan Tehnologi Penangkapan Ikan di Komunitas Nelayan Pantai TPI Pancer	57
4.2.2 Perubahan Kelembagaan Nelayan Rumpon di TPI Pancer.....	74
4.3 Dampak Tehnologi Rumpon Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan di Perairan Pesanggaran.....	87
4.3.1 Perubahan Pendapatan Adanya Tehnologi Rumpon	91
4.4 Pembahasan.....	103
4.4.1 Perubahan Kelembagaan Nelayan Dalam Ketebaharuan Tehnologi Rumpon Nelayan Tangkap TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.....	103

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	108
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	

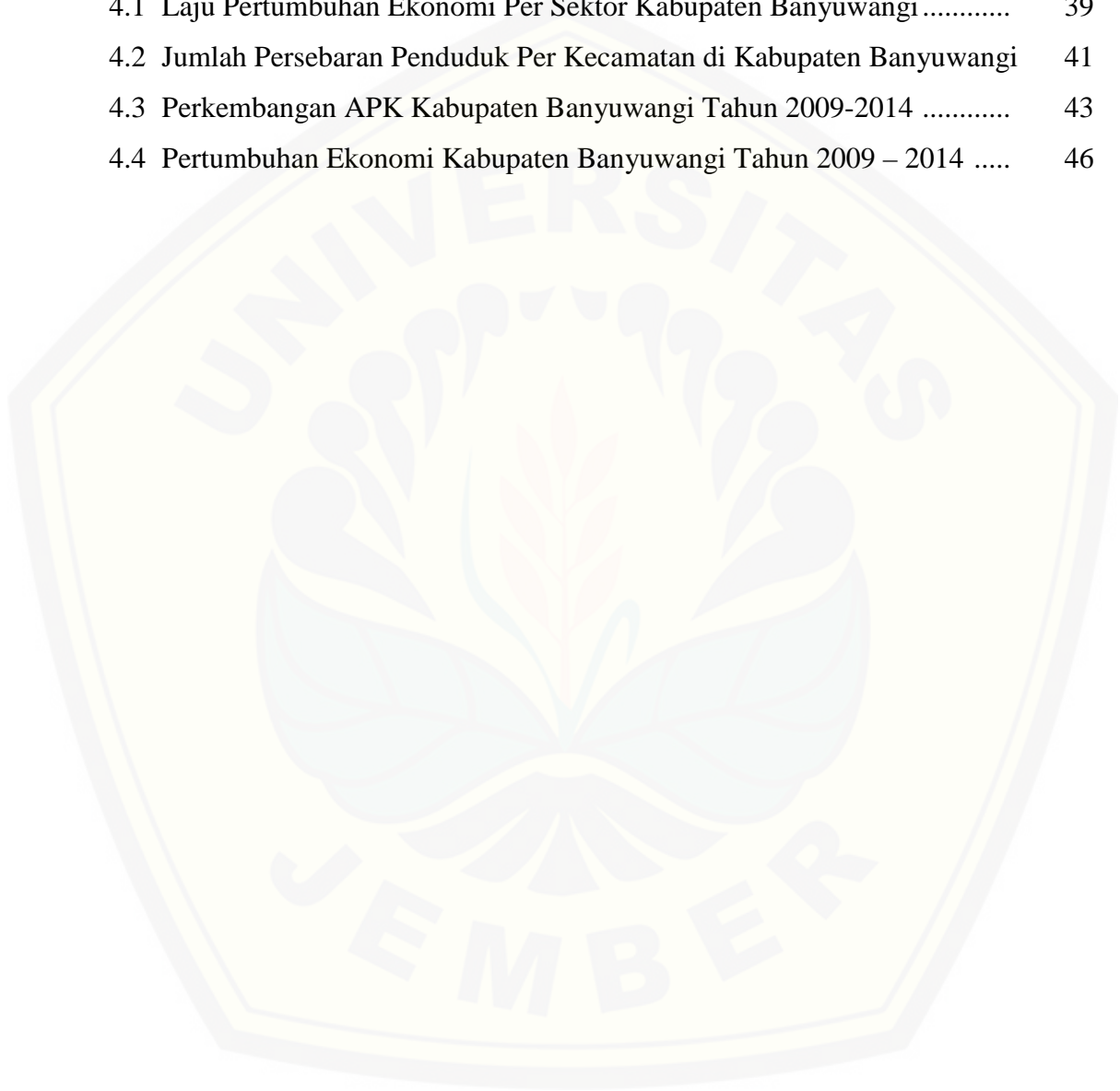


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Banyuwangi	4
1.2 Jumlah Produksi Penangkapan Ikan di Laut Per Kecamatan Tahun 2013 dan 2014	5
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Mata Pencarian	42
4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 -2014 (Juta Rupiah).....	45
4.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Pasanggaran	50
4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Pasanggaran	50
4.5 Pembagian Aktivitas Nelayan	81
4.6 Uraian Pekerjaan Kelompok Nelayan	86
4.7 Uraian Pekerjaan Kelompok Nelayan Mina Lestari	86
4.8 Uraian Pekerjaan Kelompok Nelayan Pelopor Bahari	87
4.9 Rekapitulasi Produksi Hasil Tangkapan Bantuan Rumpon Laut Dalam Tahun 2014	91
4.10 Perubahan Kelembagaan Nelayan Rumpon	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	31
4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor Kabupaten Banyuwangi	39
4.2 Jumlah Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi	41
4.3 Perkembangan APK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009-2014	43
4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 – 2014	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil transkrip wawancara

Lampiran 2 Foto dokumentasi



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perikanan tangkap Indonesia mendominasi hasil produksi perikanan walaupun telah terjadi *over fishing* diberbagai tempat. Kegiatan penangkapan yang tidak terkendali, umumnya terjadi di wilayah pesisir, karena daerah tersebut merupakan wilayah subur dan memiliki kelimpahan sumberdaya tinggi (Nybakken 1988). Perikanan tangkap adalah kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas (Monintja, 1993). Berdasarkan statistik perikanan tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP, 2008), bahwa nelayan skala kecil mendominasi usaha perikanan tangkap di Indonesia yaitu sebesar 97,02%. Nelayan skala kecil ini pada umumnya melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dengan berbagai keterbatasan, antara lain: modal, ilmu pengetahuan, sarana dan ruang gerak. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil tangkapan mereka yang berimbas pada pendapatannya yang rendah.

Kondisi perikanan laut di Indonesia secara umum didominasi oleh perikanan rakyat yang menggunakan pantai sebagai daerah penangkapannya. Hampir 90% produksi ikan Indonesia disumbangkan dari perikanan pantai, yang secara umum merupakan perikanan skala kecil. Banyaknya perahu penangkapan ikan yang terkonsentrasi di pantai disebabkan karena wilayah pantai merupakan kawasan yang memiliki sumberdaya alam paling kaya dan merupakan bagian paling produktif di antara seluruh perairan bahari (Wiyono 2010). Wilayah pesisir atau pantai menghasilkan sebagian besar (80%) produksi perikanan dunia (Mulyana, 1994).

Nelayan tradisional pada umumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan ciri-ciri yang melekat pada mereka yaitu suatu kondisi yang subsisten, dengan modal yang kecil, teknologi yang digunakan dan kemampuan/skill serta perilaku yang tradisional baik dari segi keterampilan, psikologi dan mentalitas. Jika kesejahteraan keluarga diukur hanya dari aspek ekonomi, maka keluarga nelayan lebih sejahtera dibandingkan dengan keluarga

bukan nelayan. Sebaliknya, jika kesejahteraan diukur dengan berbagai dimensi kehidupan, maka keluarga nelayan lebih rendah tingkat kesejahteraannya (Muflikhati, *et al.*, 2010).

Pengembangan penangkapan ikan pada hakekatnya berarah pada pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan rasional bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan nelayan khususnya, tanpa menimbulkan kerusakan sumberdaya ikan itu sendiri maupun lingkungan. UU No. 31/2004 tentang perikanan juga mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan, termasuk kegiatan perikanan tangkap harus dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Sumberdaya perikanan yang mempunyai sifat hak milik bersama (*common property*), dimana pemanfaatan sumberdaya tersebut dapat digunakan dalam waktu bersamaan oleh lebih dari satu individu. Oleh karena itu pada jenis usaha pemanfaatan yang akan memberikan tingkat keuntungan yang relatif baik, akan menimbulkan tekanan pemanfaatan yang kuat sehingga apabila tidak diatur dengan baik akan cenderung mengarah pada pemanfaatan berlebihan dan tidak menutup kemungkinan terjadinya ancaman atas kelangsungan usaha itu sendiri.

Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan agar dapat mencapai hasil yang optimal, tidak dapat lepas dari pendekatan pengelolaan sistem dinamik, karena bagaimanapun, sumberdaya perikanan adalah sumberdaya yang dinamis. Sumberdaya perikanan adalah aset yang dapat bertambah dan berkurang. baik secara alamiah maupun karena intervensi manusia. Seluruh dinamika alam dan intervensi ini mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi sumberdaya perikanan tersebut sepanjang waktu (Fauzi dan Anna, 2005). Selama ini masyarakat nelayan identik dengan masyarakat miskin dan terpinggirkan, tetapi jika dikaitkan dengan potensi sumberdaya pesisir dan laut yang ada di perairan Indonesia yang menyimpan banyak manfaat, seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan (Elier, 2007)

Salah satu alat tangkap sederhana yang banyak tersebar di Indonesia dan masih digunakan oleh usaha perikanan skala kecil adalah alat tangkap pancing ulur atau *hand line*. Kelebihan dari alat tangkap pancing ulur adalah

mudah dioperasikan pada berbagai wilayah pantai, selektif, minimnya by-catch, mudah di buat dan hasil tangkapannya beragam dari mulai ikan permukaan (pelagis) hingga ikan dasar (demersal) (Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, 2011).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil, salah satu alternatif untuk menyelesaikan keterbatasan tersebut adalah penangkapan ikan berbasis rumpon. Menurut Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 30/MEN/2004 tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon yang merupakan pengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor:51/Kpts/1997 dinyatakan bahwa rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dirancang atau dibuat dengan struktur tertentu sehingga dapat ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut. Monintja (1993) menyatakan bahwa rumpon dipasang di perairan pada daerah penangkapan (*fishing ground*) tertentu, agar ikan-ikan tertarik untuk berkumpul di sekitar rumpon sehingga mudah ditangkap dengan alat penangkap ikan. Ikan-ikan kecil berkumpul di sekitar rumpon karena terdapat lumut dan plankton yang menempel pada atraktor rumpon. Ikan-ikan kecil ini mengundang ikan-ikan lebih besar pemangsanya dan demikian seterusnya hingga ikan potensial (seperti cakalang, tuna, tenggiri, dan lainnya) berada di sekitar rumpon yang dipasang di laut.

Kegiatan penangkapan ikan berbasis rumpon, mempunyai kelebihan dibandingkan kegiatan penangkapan ikan lainnya, yaitu: (a) mengurangi biaya operasional penangkapan terutama bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan komponen utama biaya operasional, (b) mempersingkat hari operasi penangkapan (*fishing trip*), (c) mempunyai kepastian daerah operasi penangkapan (*fishing ground*), dan (d) meningkatkan hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan (Imron dan Baskoro, 2006). Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Naamin (1987), dengan adanya rumpon sangat dirasakan manfaatnya oleh nelayan karena dapat menghemat 50-60% bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan komponen pembiayaan terbesar dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Berdasarkan penelitian Monintja dkk (1999), bahwa pemanfaatan rumpon yang menggunakan alat tangkap pancing untuk penangkapan

ikan Madidihang (*Thunnus Albacores*) yang merupakan salah satu jenis ikan tuna di perairan Pelabuhanratu dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penangkapan ikan bagi nelayan.

Salah satu wilayah perikanan yang telah menerapkan teknologi rumpon adalah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki wilayah laut dimana Selat Bali yang terletak di sebelah Timur dengan dominasi ikan permukaan (pelagis), dan hasil terbesar lemuru (*Sardinella lemuru*) serta Samudra Indonesia yang terletak di sebelah selatan dengan dominasi ikan dasar (demersal) di samping ikan pelagis kecil dan besar. Banyuwangi mempunyai pesisir pantai sepanjang \pm 282 Km, beberapa wilayah pesisir merupakan lahan yang potensial bagi Budidaya Air Payau/tambak, pembenihan udang windu, dan lain-lain. Ada 15 pulau yang belum dimanfaatkan dengan baik. Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Banyuwangi dijelaskan Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Banyuwangi

No.	Macam Perikanan tangkap	2013		2014	
		Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Produksi (kg)	Nilai (Rp)
1.	Laut	49.551.442	658.183.025.200	60.466.140	1.024.215.203.000
2.	Perairan Umum	130.653	1.208.937.300	139.405	1.279.208.000
	Jumlah	49.682.065	659.391.962.500	60.605.545	1.025.494.411.000

Sumber: Laporan tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2014

Tabel 1.1 menjelaskan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Banyuwangi masih dibawah potensi penangkapan maksimum lestari (MSY) sebesar 258.900 ton/tahun yang dibagi menjadi 2 wilayah penangkapan yaitu Selat Bali dengan nilai MSY sebesar 46.400 ton/tahun dan wilayah Samudera Indonesia sebesar 212.500 ton/tahun. Sehingga produksi perikanan tangkap Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 dan 2014 masih jauh dibawah potensi penangkapan maksimum lestari (MSY) yakni sebesar $< 25\%$ (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi, 2014).

Data produksi penangkapan ikan di laut menunjukkan bahwa usaha perikanan tangkap masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, terutama di wilayah penangkapan ikan Samudera Indonesia yang mempunyai potensi penangkapan maksimum lestari (MSY) sebesar 212.500

ton/tahun. Sedangkan pemanfaatannya hanya berada di dua kecamatan yakni Kecamatan Purwoharjo dan Kecamatan Pesanggaran dengan nilai produksi <15% dari potensi penangkapan maksimum lestari (MSY). Berikut adalah data produksi penangkapan di laut berdasarkan per Kecamatan tahun 2013-2014 .

Tabel 1.2. Jumlah Produksi Penangkapan Ikan di Laut Per Kecamatan Tahun 2013 dan 2014

No	Kecamatan	2013		2014	
		Kg.	Rp.	Kg.	Rp.
1.	Muncar	21.466.872	268.275.362.150	21.141.772	371.940.411.400
2.	Pesanggaran	11.404.097	137.027.312.700	18.317.117	278.374.332.000
3.	Purwoharjo	8.202.100	98.426.040.850	11.493.977	188.846.696.600
4.	Wongsorejo	2.992.545	51.716.509.350	2.292.796	41.167.337.200
5.	Kalipuro	1.533.268	31.121.734.150	1.397.344	32.589.080.200
6.	Banyuwangi	844.809	14.629.547.150	2.599.225	41.108.275.700
7.	K a b a t	1.005.950	19.800.402.300	1.282.351	28.423.957.100
8.	Rogojampi	1.643.579	31.302.655.000	1.569.722	35.656.489.600
9.	Tegaldlimo	458.222	5.883.461.550	371.836	6.108.623.200
10.	Siliragung	0	0	0	0
11.	Bangorejo	0	0	0	0
J u m l a h		49.551.442	658.183.025.200	60.466.140	1.024.215.203.000

Sumber: Laporan tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2014

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa produksi hasil penangkapan Ikan terbesar setelah Muncar dihasilkan Kecamatan Pesanggaran yang mencapai 18.317.117 kg atau sebesar $\pm 30\%$ dari semua produksi hasil penangkapan ikan di laut Kabupaten Banyuwangi. Hal ini disebabkan karena usaha penangkapan ikan di Pesanggaran merupakan sentra (Pusat) kegiatan penangkapan dan telah tersedia tempat pendaratan ikan yang memadai yaitu Pelabuhan Perikanan (PP) Pancer yang merupakan satu-satunya di wilayah selatan Kabupaten Banyuwangi. Saranan penangkapan yang digunakan juga lebih baik yaitu menggunakan kapal penangkapan yang lebih besar dan dengan cara yang lebih intensif di banding kecamatan yang lain.

Kecamatan Pesanggaran merupakan wilayah pesisir dan pelabuhan perikanan, serta menjadi sentra perikanan tangkap di wilayah ZEEI (Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia) di Jawa Timur dan khususnya Banyuwangi. Kecamatan Pesanggaran sangat diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Potensi Perikanan di Kecamatan Pesanggaran sangatlah tinggi, terutama potensi perikanan tangkap dengan komoditas ikan demersal, ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Sehingga produksi ikan dari Kecamatan ini menjadi penyumbang bahan baku bagi industri pengolahan ikan baik di Kecamatan Muncar untuk ikan pelagis kecil dan di Benoa (Bali) serta Surabaya untuk Ikan Tuna.

Tingginya potensi perikanan di Pesanggaran juga menarik Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat kawasan ekonomi terpadu. Sejak tahun 2010, kementerian ini sudah menyiapkan Pesanggaran bersama 15 daerah lain di Indonesia sebagai kawasan minapolitan yakni, sebuah kawasan pembangunan ekonomi terpadu berbasis kelautan dan perikanan. Penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan dapat berupa kegiatan produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan ikan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP – RI, 2010)

Masyarakat Kecamatan Pesanggaran hidup sekitar 50.364 jiwa. Sebanyak 3,5 persen (1.770 orang) di antaranya menggantungkan hidup pada sektor kelautan. Mayoritas mereka (lebih kurang 75 persen) sebagai adalah juragan atau pemilik perahu motor dan sisanya sebagai buruh nelayan. Ini menunjukkan masih adanya angka kemiskinan di Kecamatan Pesanggaran. Seharusnya Pesanggaran memiliki potensi yang sangat besar untuk mensejahterakan masyarakatnya. Keadaan Perikanan Pesanggaran tahun 2011-2014, Pesanggaran merupakan penghasil ikan tangkap kedua di Kabupaten Banyuwangi setelah Kecamatan Muncar dengan jenis ikan pelagis besar sebagai jenis ikan utama hasil tangkapan nelayan. Pemanfaatannya juga belum intensif terbukti dari masih sedikitnya jumlah nelayan dan armada penangkapan dibanding luas area penangkapan ikan yang luasnya ± 2.000 mil² (Samodra Indonesia). Luas area penangkapan ini belum termasuk perairan ZEEI sejauh 200 mil dengan basis utamanya Pancer (Kecamatan Pesanggaran) dan Grajagan (Kecamatan Purwoharjo). Wilayah perairan ini memiliki potensi lestari

sebesar 212.500 ton / tahun yang terdiri dari ikan demersal sebesar 103.000 ton / tahun dan ikan permukaan sebesar 109.500 ton / tahun. Pada tahun 2012 jumlah ikan yang berhasil didaratkan di Kecamatan Pesanggaran sebesar 5.537 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 41,4 M. dan meningkat sebesar 11.404 ton dengan nilai produksi Rp 137 M pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 jumlah ikan yang berhasil didaratkan nelayan terus meningkat tajam dan mampu mendaratkan ikan sebesar 18.317 dengan nilai produksi sebesar Rp 278,4 M. Meningkatnya jumlah tangkapan ini tidak terlepas dari turunnya jumlah pasokan ikan yang ada di Selat Bali sehingga nelayan cenderung mencari daerah tangkapan lain seperti di perairan Pancer (Putra, 2011)

Peningkatan jumlah hasil tangkapan yang terjadi pada tahun 2012-2014 secara langsung akan meningkatkan pendapatan nelayan itu sendiri. Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan tingkat pendapatan pada urutan pertama sebagai indikator kesejahteraan ekonomi yang menunjukkan bahwa variabel ini merupakan motor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan yang terjadi selama jumlah hasil tangkapan ikan naik memberikan dampak pada kemudahan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Salah satu pendorong peningkatan jumlah ikan hasil tangkapan di TPI Pancer Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran disebabkan karena teknologi baru yang membantu nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Rumpon atau *Fish Aggregating Device* (FAD) adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul disekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap. Hasil komunikasi personal dengan salah satu pengurus kelompok nelayan di Pesanggaran bahwa di Pesanggaran rata-rata nelayan menggunakan Pancing Ulur disamping menggunakan alat tangkap *gill net*. Selain karena selektifitasnya yang tinggi, pancing ulur juga termasuk alat tangkap yang sederhana sehingga mudah untuk dioperasikan sehingga bisa memudahkan nelayan untuk menangkap ikan. Semenjak ada rumpon, nelayan di Pesanggaran sudah tidak perlu lagi mencari tempat berkumpulnya ikan, nelayan hanya tinggal pergi ke rumpon yang ada

lalu menangkap ikan di sekitar rumpon yang sedang ada berkumpulnya ikan. Tehnologi rumpon diharapkan akan membantu nelayan untuk mendapatkan hasil ikan tangkap yang membantu meningkatkan kesejahteraannya dengan meningkatnya pendapatan nelayan Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran. Keberadaan rumpon di perairan Pesanggaran saat ini telah meningkatkan kesejahteraan yang nyata bagi nelayan yang memanfaatkan rumpon dan mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Perikanan (PP) Pancer. Keberadaan rumpon akan mempercepat waktu operasi penangkapan, meningkatkan catch per unit effort sehingga meningkatkan pendapatan nelayan.

Dalam rangka keberlanjutan keberadaan rumpon di Pesanggaran yang dapat memberikan manfaat potensial secara ekonomi dan kelestarian lingkungan dan sumberdaya ikan, dan dapat diterima dan aman bagi nelayan yang melakukan aktifitas usaha penangkapan ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya di PP Pancer, maka harus mempertimbangkan keterpaduan dimensi ekologi, teknologi yang akan digunakan, manfaat ekonomi yang akan diperoleh, dan dapat diterima oleh semua nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan di perairan TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengacu kepada latar belakang, tujuan, dan kerangka pemikiran penelitian, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana perubahan kelembagaan nelayan dalam ketebaharuan tehnologi rumpon nelayan tangkap TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi?
- b. Bagaimana dampak tehnologi rumpon terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di perairan Pesanggaran?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perubahan kelembagaan nelayan dalam ketebaharuan teknologi rumpon nelayan tangkap TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.
- b. Untuk mengetahui pengaruh teknologi rumpon terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di perairan Pesanggaran

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat berupa penyediaan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan rumpon laut dalam yang berkelanjutan berdasarkan keterpaduan dimensi (kelembagaan, ekonomi, teknologi, sosial).

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kebijakan terutama berkaitan dengan usaha perikanan tangkap.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi nelayan /juragan darat dalam meningkatkan usahanya terutama dalam penggunaan teknologi rumpon laut dalam.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ekonomi Kelembagaan

Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan (*rule of the game*) berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang membentuk perekonomian yang efisien. Deliarnov (2006) menjelaskan bahwa kelembagaan sebagai aturan permainan sedangkan organisasi adalah wadah sebagai tempat bermain bagi sekumpulan orang. Setiap pemain mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana memenangkan permainan tetapi mempertimbangkan norma-norma dan aturan yang berlaku. Penyimpangan aturan main akan menyebabkan sistem berjalan tidak normal karena kelembagaan yang baik dapat menyelesaikan masalah koordinasi dan produksi. Sebab masalah koordinasi dan produksi terkait dengan motivasi para aktor, lingkungan dan kemampuan pemain dalam mengkondisikan lingkungan yang menghubungkan pilihan dengan hasil. Sementara itu North (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai “*the rules of game*” memandang bahwa dalam pengambilan suatu bentuk norma sosial atau “*legal rule*” yang disebutnya sebagai “*external constrains*” dapat mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan hal terbaik yang dipilihnya secara optimal. Kelembagaan dapat pula dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota – anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang dapat diawasi sendiri maupun dimonitori oleh otoritas luar (*external authority*).

Pendapat lain menyatakan kelembagaan berisi serangkaian batasan-batasan atau perilaku dalam bentuk aturan dan regulasi; serangkaian prosedur untuk mendeteksi deviasi dari aturan dan regulasi sehingga didalamnya berisi serangkaian norma etika berperilaku dan moral sebagai pertimbangan pokok untuk melakukan interaksi ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya (Anyonge *et al.*, 2013). Meski sifatnya tidak linier namun cenderung menjadi kebutuhan

individu anggotanya berupa kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman (*safe*), kebutuhan hubungan sosial (*social affiliation*), pengakuan (*esteem*), dan pengembangan pengakuan (*self actualization*) (Elizabeth, 2003).

Dari berbagai definisi yang ada, dapat kita rangkum berbagai unsur penting dari kelembagaan, di antaranya adalah (Djogo, *et al.*, 2003):

1. institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat;
2. norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur;
3. peraturan dan penegakan aturan/hukum;
4. aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota;
5. kode etik;
6. kontrak;
7. pasar;
8. hak milik (*property rights atau tenureship*);
9. organisasi;
10. insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan.

Gambaran atas pengertian kelembagaan secara umum di atas merupakan dasar penjelasan awal dalam pengembangan teori kelembagaan..Akibatnya evolusi dalam masyarakat akan menimbulkan kontradiksi antara seremonial atau perilaku yang berkaitan dengan uang, yang berlaku berdasarkan kelas rekreasi dan kekuatan-kekuatan sosial yang tertarik pada kegiatan industri. Veblen mendefinisikan kegiatan industri dengan semua upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kehidupan manusia dengan mengambil keuntungan dari lingkungan non-manusia (Hodgson, 1998). Veblen dalam Hodgson (1998) meluncurkan kritiknya terhadap orang hedonistik yang selalu menggunakan mikro modern dan teori makro untuk terus memaksimalkan utilitas untuk konsumen dan keuntungan bagi perusahaan sehingga perekonomian negara stabil. Dengan demikian

memerlukan peran lembaga dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Pada realitanya lembaga yang sekarang berkembang di pedesaan merupakan lembaga modern karena umumnya telah memiliki struktur dan tata nilai yang jelas; telah diformalkan (dengan terdapatnya kepastian anggota dan proses pelaksanaan); adanya aturan tertulis dalam anggaran dasar dan rumah tangga; adanya kepemimpinan yang resmi; dan biasanya sengaja dibentuk karena tumbuhnya kesadaran pentingnya keberadaan lembaga tersebut (Elizabeth, 2007). Perubahan kelembagaan merupakan sebuah proses yang terjadi secara terus menerus, sehingga perubahan kelembagaan disebut sebagai transformasi permanen (Yustika, 2012). Perubahan kelembagaan terjadi melalui dua cara, cara pertama dilakukan secara sukarela dan cara kedua dipaksakan oleh lembaga yang lebih kuat. Cara pertama umumnya didasari oleh kesepakatan kelompok/individu atas kesepakatan baru yang lebih menguntungkan. Namun pada cara kedua perubahan kelembagaan yang dirintis oleh pemerintah sebenarnya juga memiliki tujuan yang sama dengan cara pertama. Cara perubahan kelembagaan merupakan proses yang terjadi secara terus menerus sebagai akibat interaksi antar pelaku ekonomi untuk kepentingan tertentu.

Hira dan Hira (2000) juga menjelaskan bahwa proses perubahan kelembagaan dapat terjadi karena dua hal yaitu reaksi dari faktor ekonomi baru yang biasanya direfleksikan dengan adanya perubahan harga relatif dan selera. Kedua wirausahawan (dapat organisasi maupun individu) mengeksploitasi seluruh potensi yang terdapat dalam sebuah sistem kelembagaan, yang ujung-ujungnya akan menghasilkan perubahan yang inovatif. Selain itu terdapat dua faktor yang dapat dipetakan sebagai penyebab perubahan kelembagaan (*institutional change*) yakni permintaan dari pelaku dan penawaran dari lembaga yang memiliki otoritas spesifik. Kedua adalah pemerintah memiliki itikad untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan tenaga kerja dalam bidang komoditas tertentu melalui penerapan harga tertentu guna melindungi penduduk yang ada di sektor tersebut (Hubbard, 1997).

2.1.2 Teori Kesejahteraan

Ide mengenai sistem kesejahteraan negara yang berkembang di Indonesia biasanya lebih sering bernuansa negatif ketimbang positif. Misalnya, sering kita dengar bahwa sistem kesejahteraan negara adalah pendekatan yang boros, tidak kompatibel dengan pembangunan ekonomi, dan menimbulkan ketergantungan pada penerimanya (*beneficiaries*). Akibatnya, tidak sedikit yang beranggapan bahwa sistem ini telah menemui ajalnya, alias sudah tidak dipraktikkan lagi di negara manapun. Meskipun anggapan ini jarang disertai argumen dan riset yang memadai, banyak orang menjadi kurang berminat membicarakan, dan apalagi, memperhitungkan pendekatan ini. Menurut Keynes dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah Edhi Suharto/Welfare State/2006 5 sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Upaya penciptaan kesejahteraan di masyarakat dapat diartikan pula sebagai upaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan memang tidak dapat dihilangkan namun kemiskinan dapat dikurangi, hal inilah yang terus diupayakan oleh pemerintah. Social security dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kemiskinan bukan untuk menghilangkan kemiskinan melalui program-programnya.

Kemiskinan (*poverty*) pada dasarnya merupakan aktifitas politik, konflik politik terhadap kemiskinan akan mengarah pada kemiskinan itu sendiri. Dimensi yang berkaitan dengan kemiskinan meliputi tiga hal yaitu kegunaan (*utility*), penghasilan (*income*), dan kemampuan (*capabilities*). Utility tidak hanya mengacu pada preferensi secara individu, tetapi juga dasar tujuan dari kebijakan dengan

memperhatikan preferensi individu bersangkutan. Income kadang diinterpretasikan dengan “ukuran uang” yang menekankan pada pendapatan perkapita sebagai ukuran pembangunan. *Capabilities* berkaitan dengan kekurangan kebutuhan dasar, termasuk di dalamnya menghindari kemiskinan dan buta huruf (Sen, 1985) dalam Suryawati (2005:15).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang penanganannya membutuhkan keterkaitan berbagai pihak. Kemiskinan di Indonesia diiringi oleh masalah kesenjangan baik antargolongan penduduk maupun pembangunan antarwilayah, yang diantaranya ditunjukkan oleh buruknya kondisi pendidikan dan kesehatan serta rendahnya tingkat pendapatan dan daya beli. Kemiskinan hanyalah sebagai salah satu masalah klasik yang selalu dihadapi oleh manusia, karena melibatkan seluruh aspek kehidupan, walaupun seringkali kehadirannya tidak disadari sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Menurut Chambers (dalam Suryawati, 2005:15) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005:17). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

- a. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

- b. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- c. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan (Suryawati, 2005:18).

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata. Menurut Nasikun (dalam Suryawati 2005:20), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:
 - (1) *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
 - (2) *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena poal produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi ekspor.
 - (3) *Population growth*, prespektif yang didasari oleh teori Malthus , bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deraet hitung.
 - (4) *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
 - (5) *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam.Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air,

sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

- (6) *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- (7) *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- (8) *Exploitatif inetrmediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
- (9) *Inetrnal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- (10) *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Karena itu kemiskinan terjadi di mana saja, termasuk di negara-negara maju yang secara absolut masyarakatnya telah jauh di atas garis kemiskinan. Jepang sebagai negara post-industry, rata-rata pendapatannya telah jauh melampaui garis kemiskinan absolut, tetapi masih banyak pula orang Jepang yang merasa dirinya miskin. Ini terjadi karena perasaan relatif (Winarni, 1994).

Di Indonesia sejak tahun 1976 Badan Pusat Statistik (BPS) telah menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin yaitu penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan dengan menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Garis kemiskinan, yang merupakan dasar penghitungan jumlah penduduk miskin, dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan, atau lebih dikenal dengan garis kemiskinan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu pengeluaran konsumsi

perkapita per bulan yang setara 2.100 kalori perkapita per hari. Sementara garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian, dan barang/jasa lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk yang miskin adalah yang berada di bawah garis kemiskinan, dan yang berada di atas garis kemiskinan adalah penduduk yang telah sejahtera/tidak miskin (Winarni, 1994).

Langkah utama yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki distribusi outcomes (World Bank, 1999). Di sisi lain pemerintah harus menginvestasikan dan mengalokasikan kembali (*reallocate*) anggaran berdasar pelayanan yang diberikan. Termasuk juga pendidikan dasar dan perawatan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar warga. Kebijakan yang ada akan berusaha untuk mengidentifikasi kemiskinan dan target yang ingin dicapai untuk memberikan pelayanan dengan pendistribusian kembali kebutuhan yang urgent dan penggunaan jaring pengaman sosial dalam ekonomi pasar (Lipton dan Ravallion, 1994). Target yang optimal dan program secara keseluruhan dalam memerangi kemiskinan tergantung pada banyak faktor, termasuk karakteristik the poor (siapaakah orang miskin, berapa banyak mereka, dan mengapa mereka miskin) dan kondisi spesifik yang melingkupinya (kondisi, pembangunan infrastruktur, dan kemampuan administratif). Murray (1994) membandingkan tiga ukuran kemiskinan yaitu *official poverty*, *net poverty*, dan *latent poverty*. *Official poverty* adalah jumlah kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah US dengan mendasarkan pada indeks kemiskinan. *Net poverty* adalah *official poverty* dikurangi nilai keuntungan (*the value of in-kind benefits*). *Laten poverty* adalah lebih mengacu pada jumlah orang-orang yang akan miskin jika mereka tidak menerima bantuan sosial dan *public assistance payment*.

Di Indonesia, bantuan sosial (*social assistance*) merupakan program langsung pemerintah melalui APBN atau APBD yang menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan untuk masyarakat miskin dan sangat miskin. Elemen kedua adalah jaminan sosial (*social insurance*) (Barr and Whynes, 1993), yakni program partisipasi masyarakat,

sementara pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Bentuknya berupa penyediaan jaminan sosial dasar seperti dana pensiun, dan tenaga kerja. Ketiga yakni jaminan pribadi (*individual insurance*) yang merupakan partisipasi individu dan pemerintah sebagai regulator.

a. Konsep Value for Money Sektor Publik

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep value for money.

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik (Mardiasmo, 2002:17).

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), pembangunan manusia merupakan suatu model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas

pilihan bagi penduduk yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, berupa umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.

Seperti halnya pembangunan ekonomi, pembangunan manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran, juga perlu dievaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia (penduduk) sebagai obyek pembangunan. Salah satu alat ukur yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Walaupun tidak semua aspek pembangunan manusia dapat diukur melalui penghitungan IPM mengingat sangat luasnya dimensi pembangunan manusia, tetapi paling tidak IPM dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga komponen indikator kemampuan manusia yang sangat mendasar yaitu; derajat kesehatan, kualitas pendidikan serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan tingkat daya beli masyarakat.

Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, program pembangunan PBB (UNDP) melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendapatan perkapita, tingkat pendidikan dan usia harapan hidup yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index (HDI)*.

Alat ukur ini telah digunakan baik pada tingkat nasional maupun internasional dalam melihat hasil-hasil pembangunan masing-masing propinsi atau negara. Selanjutnya alat ukur ini diperluas kegunaannya pada tingkat yang lebih rendah yaitu pada level kabupaten/kota.

Pada tahun 1990 United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan "*Human Development Index*" (HDI) atau Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Pembangunan manusia, menurut definisi UNDP, adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (*people's choice*). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar kemandirian dan tingkat kesejahteraan, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Demi memacu kemandirian dan tingkat kesejahteraan perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM.

2.1.3 Perikanan Tangkap

Perikanan adalah semua usaha penangkapan budidaya ikan dan kegiatan pengelolaan hingga pemasaran hasilnya Mubiyarto (1994) dalam Zubair dan Yasin (2011). Sedangkan sumberdaya perikanan adalah seluruh binatang dan tumbuhan yang hidup di perairan (baik di darat maupun di laut) oleh karena itu perikanan dapat dibedakan atas perikanan darat dan perikanan laut.

Perikanan darat adalah semua usaha perikanan yang tidak dilakukan di laut luas seperti perikanan air tawar, tambak, kolam dan sebagainya. Khusus perikanan di laut ahli biologi kelautan membedakan perikanan laut kedalam dua kelompok yaitu kelompok ikan pelagis (ikan yang hidup pada bagian permukaan) dan jenis ikan demersal (ikan yang hidup di dasar laut). Kelompok ikan pelagis diantaranya ikan cakalang, tuna, layang, kembung, lamun dan lain-lain. Sedangkan jenis demersal seperti udang, kepiting, kakap merah dan lain-lain.

Walangadi (2003) dalam Zubair dan Yasin (2011) mengemukakan bahwa usaha perikanan dapat dipandang sebagai suatu perpaduan faktor produksi atau suatu barang antara yang dihasilkan faktor-faktor produksi klasik tenaga kerja dan barang-barang modal atau apapun yang dianggap sejenisnya. Defenisi ini

mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh hasil yang laku dijual dan tidak terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan yang langsung dengan menangkap ikan.

Menurut Hanafiah dan Saefuddin (2000) dalam Zubair dan Yasin (2011) bahwa usaha penangkapan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan binatang atau tumbuhan yang hidup di laut untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan pengorbanan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha penangkapan merupakan segala pengorbanan yang ditujukan untuk memperoleh hasil laut dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan nelayan ataupun nelayan ikan. Nelayan adalah orang-orang yang aktif dalam melakukan kegiatan pada sub sektor perikanan dan ini dilakukan dalam usaha ekonomi, oleh karena itu indikator yang digunakan untuk menentukan bahwa seseorang termasuk nelayan apabila seluruh atau sebagian besar penghasilan pendapatan rumah tangganya merupakan kontribusi dari pendapatan yang diperoleh dari sub sektor perikanan.

Selain itu pengetahuan dan keterampilan sangat menentukan produktivitas nelayan seperti yang dikemukakan oleh Sukirno (1999) dalam Zubair dan Yasin (2011) bahwa kekurangan pengetahuan merupakan faktor lain yang menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas dan yang lebih penting adalah faktor ini yang menjadi penyebab tingkat produktivitas sejak berabad-abad yang lalu tidak mencapai perubahan yang berarti.

2.1.4 Sifat Perikanan

Menurut sifatnya, sumberdaya alam dapat dibedakan atas sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*) misalnya sumberdaya hayati, hutan dan sebagainya serta sumberdaya yang tidak dapat pulih (*exhaustible resources*) misalnya barang tambang, nikel, tembaga dan sebagainya. Sedangkan menurut kepemilikan sumberdaya alam terdiri atas sumberdaya alam yang dimiliki (*property right*) dan sumberdaya milik bersama adalah dikuasai oleh masyarakat (*common property resources*).

Perikanan merupakan salah satu sumberdaya alam yang sifatnya open akses yaitu sumberdaya alam yang pengambilannya tidak dibatasi yang berarti setiap orang secara bebas dapat mengambil sumberdaya alam oleh karena itu perikanan disebut juga sumberdaya alam milik bersama. Oleh karena sumberdaya perikanan ini milik semua orang, maka tidak seorangpun yang memilikinya. Suparmoko (1997) dalam Zubair dan Yasin (2011) mengemukakan dua ciri sumberdaya alam milik bersama yaitu (1) tidak terbatasnya cara-cara pengambilan serta (2) terdapat interaksi diantara para pemakai sumber daya ini sehingga terjadi saling berebut satu sama lain dan terjadi eksternalitas dalam biaya yang sifatnya disekonomis. Ciri-ciri hasil perikanan yaitu bersifat musiman, kecil dan terpecah, mudah rusak, jumlah dan kualitas tidak stabil karena tergantung dari musim atau alam.

2.1.5 Tehnologi Rumpon

Nelayan skala kecil yang mendominasi usaha perikanan tangkap di Indonesia pada umumnya melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dengan berbagai keterbatasan, antara lain: modal, ilmu pengetahuan, sarana dan ruang gerak. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil tangkapan mereka yang berimbas pada pendapatan yang rendah. Untuk nelayan skala besar saat ini juga mengalami keterbatasan ruang gerak penangkapan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya biaya operasional dan isu stok sumberdaya ikan ekonomis penting yang mulai menurun sehingga pendapatannya juga menurun. Salah satu alternatif untuk menyelesaikan keterbatasan tersebut telah dikembangkan penangkapan ikan berbasis rumpon.

Fish Aggregating Device (FADs) atau di Indonesia dikenal dengan sebutan rumpon adalah suatu konstruksi bangunan yang dipasang di dalam air dengan tujuan untuk memikat ikan agar berasosiasi dengannya sehingga memudahkan penangkapan ikan tersebut (Monintja, 1995). Rumpon sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan dan berfungsi sebagai tujuan daerah penangkapan yang memudahkan nelayan dalam mencari ikan. Menurut Imron dan Baskoro dalam DKP (2007), keuntungan rumpon dalam

usaha penangkapan ikan di laut adalah : (a) menghemat bahan bakar untuk mencari daerah penangkapan, (b) mempersingkat hari operasi penangkapan (*fishing trip*), (c) mempunyai kepastian daerah operasi penangkapan, dan (d) meningkatkan hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan. Selain untuk kegiatan penangkapan ikan, rumpon juga dapat difungsikan untuk pengembangan jasa lingkungan. Potensi jasa lingkungan kelautan yang masih memerlukan sentuhan pendayagunaan secara profesional adalah kegiatan wisata menangkap ikan di sekitar rumpon seperti di Australia. Sebagai negara bahari ternyata pangsa pasar wisata itu cukup baik terutama bila rumpon berada di sekitar kepulauan sehingga dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan penangkapan. Hasil penelitian Merta dan Suhendarata (1991) menyatakan bahwa penangkapan ikan cakalang di sekitar rumpon lebih menarik dari kegiatan lomba konsumsi ikan cakalang. Hal ini mendukung upaya pemanfaatan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan, dimana kegiatan pariwisata, pelayaran, dan menyaksikan nelayan menangkap ikan pada suatu *fishing ground* tertentu lebih mengasyikkan.

Rumpon juga sangat bermanfaat untuk membantu nelayan dalam pencarian lokasi penangkapan ikan yang tepat sekaligus mengurangi kepadatan penangkapan di sekitar perairan pantai yang cenderung menimbulkan banyak konflik. Hal ini tentu dengan memperhatikan jalur pelayaran sehingga rumpon sebagai alat pengumpul ikan tidak terganggu (Budiono, 2006).

Rumpon telah lama dikenal di Indonesia maupun negara-negara lain seperti Philipina dan negara Pasifik Barat. Semula penggunaan rumpon ditujukan untuk ikan pelagis kecil, namun dengan ditemukannya bentuk konstruksi rumpon laut dalam yang disebut payaos, maka tujuan utama lebih ditekankan untuk penangkapan ikan pelagis besar terutama tuna, cakalang dan sejenisnya. Penggunaan payaos diperkenalkan oleh Philipina pada tahun 1978 yang merupakan pembaharuan teknologi dalam perkembangan konstruksi rumpon.

Keberhasilan penggunaan payaos ini di Philipina, segera diikuti oleh negara-negara yang merasa memiliki Samudera Hindia dan Pasifik seperti Jepang. Di Indonesia penggunaan payaos baru diperkenalkan pada tahun 1988.

Menurut Subani (1988), nelayan Sulawesi (Teluk Mandar, Mamuju, Teluk Tomini, Teluk Bone) telah mengenal rumpon laut dalam jauh sebelum perang dunia II dan menyebutnya dengan nama rompong mandar atau rompong lompo. Penggunaan rumpon telah berkembang dengan pesat terutama rumpon laut dangkal di perairan Selat Malaka dan Laut Jawa dengan alat tangkap purse seine mini. Rumpon laut dalam telah berkembang di daerah Bagian Timur seperti di Sorong, Fak-fak, Maluku Utara, Teluk Tomini Laut Sulawesi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Laut Pasifik Barat dan Nusa Tenggara Timur serta saat ini berkembang di Samudera Hindia khususnya Barat Sumatera (DKP, 2007). Berdasarkan penempatannya, di Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis rumpon yaitu rumpon laut dangkal, laut dalam dan dasar. Rumpon laut dangkal yaitu alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan di perairan laut dengan kedalaman sampai 200 meter dan biasanya dipergunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil, sedangkan rumpon laut dalam yaitu alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan di perairan laut dengan kedalaman lebih besar dari 200 meter untuk penangkapan ikan tuna dan cakalang di samping pelagis kecil. Rumpon laut dasar yaitu rumpon yang dipasang di dasar perairan dan umumnya menangkap ikan-ikan dasar dan ikan- ikan karang (Departemen Pertanian, 1997). Namun rumpon perairan dasar lebih banyak diarahkan sebagai upaya perbaikan habitat kehidupan ikan yang dapat membantu ikan mendapatkan "rumahnya" (terumbu buatan) dengan kata lain untuk konservasi ekosistem (DKP, 2007).

Menurut Preston (1982), bahwa penempatan rumpon laut dalam harus disesuaikan dengan kondisi perairan setempat dengan memperhatikan beberapa faktor sebelum memasang rumpon di suatu perairan yaitu:

- a. Lokasi perairan di lewati ruaya ikan cakalang dan tuna,
- b. Dasar perairan yang rata,
- c. Kekuatan arus dan angin yang tidak terlalu besar.

Menurut Jusuf (1999), beberapa kondisi lingkungan perairan yang diperlukan dalam pemasangan rumpon, antara lain :

- a. Perairan yang akan ditempatkan rumpon merupakan daerah/habitat kelompok ikan cakalang dan tuna di lokasi tersebut.
- b. Perairan kaya dengan unsur hara atau nutrien
- c. Kekuatan arus dan angin tidak terlalu besar.
- d. Diutamakan merupakan lokasi pertemuan arus panas dan arus dingin

Teknologi penangkapan ikan tepat guna adalah untuk mendapatkan jenis alat tangkap ikan yang mempunyai keragaman yang baik ditinjau dari aspek biologi, teknis, sosial dan ekonomi, sehingga merupakan alat tangkap yang cocok untuk dikembangkan. Menurut Haluan dan Nuraini (1993), untuk pengembangan teknologi penangkapan ikan, ada aspek-aspek yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Tidak merusak biologi dan kelestarian sumberdaya,
- b. Secara teknis efektif digunakan,
- c. Secara sosial dapat diterima oleh masyarakat nelayan,
- d. Secara ekonomi dapat menguntungkan,
- e. Memperoleh izin dari pemerintah.

Teknologi tambatan rumpon biasanya diberi pelepah daun kelapa, bambu dan lainnya yang memudahkan algae tumbuh subur di permukaan. Adanya algae dan sejenisnya menarik minat ikan kecil ke rumpon, dan adanya ikan kecil menarik minat ikan besar ke rumpon. Prinsip umum komponen utama konstruksi bangunan rumpon sejak dahulu hingga sekarang tidak berubah yaitu terdiri dari rakit, pelampung (*buoy*), jangkar (*anchor/sinkers*), tali jangkar (*rope*) dan pemikat ikan (*attractor*), bendera atau tanda pemilik rumpon. Selain berdasarkan penempatannya, berdasarkan konstruksinya rumpon dikelompokkan menjadi rumpon tradisional dan rumpon moderen. Konstruksi teknologi rumpon tradisional meliputi :

- a. Pelampung (*buoy*), terbuat dari rakit bambu.
- b. Tali jangkar (*rope*), setiap daerah memiliki perbedaan, seperti; nelayan Jawa dan Madura menggunakan bahan ijuk dan Sulawesi menggunakan rotan.
- c. Pemikat ikan (*attractor*) terbuat dari pelepah daun kelapa, lontar, bambu dan sebagainya.

- d. Jangkar/Pemberat (*anchor*) terbuat dari beberapa batu yang dirangkai menjadi satu dan jangkar yang dibuat dari bahan kayu.

Jenis rumpon tradisional ini telah lama digunakan oleh nelayan di daerah Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Rumpon nelayan daerah Jawa dan Madura dipasang pada perairan dangkal (*continental shelf*) pada kedalaman sekitar 40 – 60 meter. Sedangkan nelayan daerah Sulawesi memasang rumpon pada kedalaman 500 – 2.000 meter. Target tangkapan umumnya kelompok ikan pelagis kecil dengan menggunakan alat tangkap pukat cincin (*purse seine*) atau payang dari nelayan Jawa dan Madura. Sedangkan nelayan Sulawesi menggunakan alat tangkap pancing ulur (*hand line*) dengan target tangkapan ikan tuna atau sejenisnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian tentang perubahan kelembagaan nelayan dan kesejahteraan nelayan. Hasil penelitian Zulkarnain (2002) tentang penggunaan rumpon pada bagan apung di teluk Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, bahwa ikan yang tertangkap dengan alat tangkap bagan disekitar rumpon jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan bagan apung tanpau rumpon. Ikan-ikan yang tertangkap merupakan ikan-ikan yang berasosiasi dengan rumpon yaitu ikan pelagis kecil.

Nahib (2007) meneliti tentang analisis dinamik pengelolaan sumberdaya perikanan tuna kecil di perairan Pelabuhan Ratu. Hasil penelitian bahwa keberadaan rumpon akan menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ikan sebesar 1,5-5,6%, peningkatan kemampuan daya tangkap sebesar 7-10%, peningkatan produksi sebesar 22% , serta penurunan kapasitas daya dukung 3-10%.

Arifin (2008) meneliti tentang pengaturan kepadatan rumpon, yaitu dengan mempelajari jumlah hasil tangkap, sifat ekologi wilayah, karakteristik lingkungan perairan, dan kebutuhan ekonomis masyarakat sekitar. Hasil penelitian Arifin (2008) di Selat Lembah menunjukkan bahwa jenis ikan pelagis yang tertangkap pada ekosistem lengkap termasuk ekosistem rumpon dapat terdiri

dari selar hijau (*Atule mate*), selar kuning (*Selaroides leptolepis*), kembang lelaki (*Rastrelliger kanagurta*), layang panjang (*Decapterus russelli*), layang gilik (*Decapterus macrosoma*), tongkol (*Auxis thazard*), selar bentong (*Selaroides crumenophthalmus*), tetengek (*Megalaspis cordyla*) dan ikan sunglir (*Elagatis bipinnulatus*). Ikan yang selalu ada sepanjang tahun dan selalu tertangkap dengan menggunakan payang bugis adalah ikan selar hijau (*Atule mate*).

Yusfiandayani et al.. (2006) meneliti tentang teknologi rumpon dna keuntungan nelayan. Hasil penelitian menyatakan bahwa rumpon akan menarik perhatian ikan karena atraktor rumpon melambai-lambai di perairan. Ikan-ikan akan bergerak mendekati rumpon karena beberapa sebab antara lain mencari makan, berkumpul berasosiasi maupun sebagai reference point bagi ikan-ikan pelagis kecil yang melakukan migrasi dan melewati perairan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di perairan Pasauran Banten, bahwa dengan luas penelitian 115 km², untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dan kelestarian sumberdaya ikan maka jarak antara satu rumpon dengan rumpon yang lain mempunyai pengaruh sebesar 23 km².

Amanah (2012) meneliti tentang model pemberdayaan petani-nelayan berbasis kelembagaan lokal dan keunikan agro ekosistem untuk peningkatan daya saing dan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kelembagaan lokal di tingkat petani-nelayan belum dapat memainkan peran sebagai wadah kerjasama, wadah belajar, dan wadah pengembangan diri petani dan nelayan, untuk mengetahui model pemberdayaan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup petani-nelayan, peran multipihak dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi agroekosistem secara berkelanjutan. Penelitian menerapkan multi metode, meliputi penilaian cepat, observasi, studi kasus, kaji tindak, dan triangulasi. Data primer dikumpulkan dari kegiatan observasi lapangan melalui penilaian cepat kepada 30 Rumah Tangga Pertanian dan 30 Rumah Tangga Perikanan. Dua desa menggambarkan desa dengan ekosistem pesisir (Desa Muara dan Desa Tanjung Pasir), dan dua desa menggambarkan desa dengan ekosistem persawahan (Desa Pulo Kencana dan

Desa Ciruas). Data sekunder dikumpulkan dari BPTP Banten, BAPPEDA, dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang. Selanjutnya pada tahun kedua dilaksanakan studi kasus dalam dan kaji tindak pada 1 desa pesisir (Desa Muara-KabupatenTangerang) dan 1 desa transisi pertanian yang memiliki kelompok wanita tani merintis tanaman obat keluarga pada ekosistem pekarangan (Desa Benteng, Kabupaten Bogor). Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Melalui penelitian, dilakukan upaya penguatan kelembagaan petani-nelayan melalui pengembangan norma-norma yang disepakati kelompok. Komunitas petani-nelayan juga dilibatkan dalam menilai upaya pengelolaan potensi agroekosistem yang dilakukan selama ini menjadi lebih optimal.

Berdasarkan beberapa penelitian maka dapat diringkas seperti Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
Zulkarnain (2002)	Untuk mengetahui penggunaan rumpon pada bagan apung di teluk Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.	Kualitatif	Penggunaan rumpon menyebabkan ikan yang tertangkap dengan alat tangkap bagan disekitar rumpon jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan bagan apung tanpau rumpon
Yusfiandayani et al.. (2006)	Mengetahui pengaruh teknologi rumpon terhadap pendapatan	Kualitatif	Tehnologi rumpon untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dan kelestarian sumberdaya ikan maka jarak antara satu rumpon dengan rumpon yang lain mempunyai pengaruh sebesar 23 km ²
Nahib (2007)	Analisis dinamik pengelolaan sumberdaya perikanan tuna kecil di perairan Pelabuhan Ratu	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan rumpon akan menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ikan sebesar 1,5-5,6%, peningkatan kemampuan daya tangkap sebesar 7-10%, peningkatan produksi sebesar 22%, serta penurunan kapasitas daya dukung 3-10%.

Peneliti (Tahun)	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
Arifin (2008)	Pengaturan kepadatan rumpon, yaitu dengan mempelajari jumlah hasil tangkap, sifat ekologi wilayah, karakteristik lingkungan perairan, dan kebutuhan ekonomis masyarakat sekitar	Kualitatif	Tehnologi rumpon dapat meningkatkan jumlah hasil tangkap sehingga meningkatkan perekonomian.
Yusfiandayani et al.. (2006)	Untuk mengetahui teknologi rumpon dan keuntungan nelayan	Kualitatif	Perairan Pasauran Banten, bahwa dengan luas penelitian 115 km ² , untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dan kelestarian sumberdaya ikan maka jarak antara satu rumpon dengan rumpon yang lain mempunyai pengaruh sebesar 23 km ²
Amanah (2012)	Mengetahui alasan kelembagaan lokal di tingkat petani-nelayan belum dapat memainkan peran sebagai wadah kerjasama, wadah belajar, dan wadah pengembangan diri petani dan nelayan, secara berkelanjutan	Kualitatif	Upaya penguatan kelembagaan petani-nelayan melalui pengembangan norma-norma yang disepakati kelompok. Komunitas petani-nelayan juga dilibatkan dalam menilai upaya pengelolaan potensi agroekosistem yang dilakukan selama ini menjadi lebih optimal

Sumber: berbagai penelitian

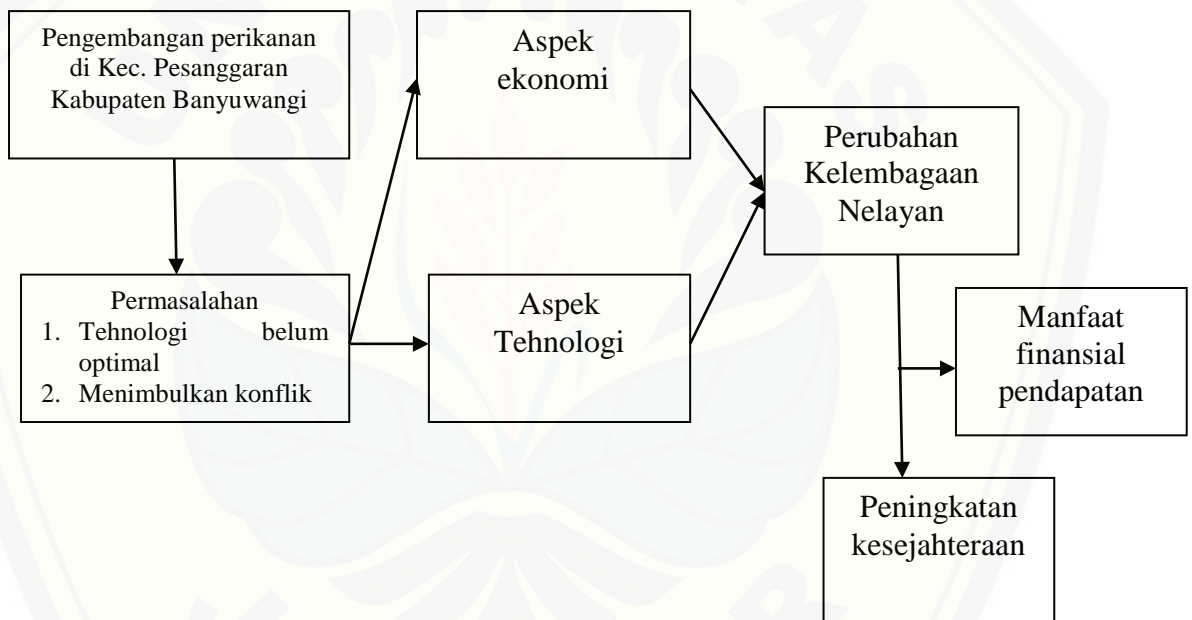
2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan mengacu kepada latar belakang dan tujuan penelitian ini, maka perlu dikembangkan pemikiran penelitian sebagai gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan sekaligus menjadi acuan penting dalam pengembangan penelitian penggunaan teknologi rumpon yang berkelanjutan di perairan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Perairan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi dalam pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagai alat bantu penangkapan maka kemungkinan pemasangan dan pemanfaatan rumpon di Kabupaten Banyuwangi tersebut akan semakin berkembang dalam kegiatan usaha penangkapan ikan. Saat ini keberadaan rumpon telah memberikan manfaat positif kepada nelayan yaitu jumlah hasil tangkapan meningkat, sehingga pendapatan nelayan pemanfaatan rumpon juga meningkat. Jangka panjang, karena keberadaan rumpon mempengaruhi biomass ikan maka penambahan jumlah rumpon akan mempengaruhi ketersediaan biomass yang ada, dan pada waktu tertentu hasil tangkapan dapat menurun sehingga pendapatan nelayan juga menurun. Hal ini terjadi karena dalam kegiatan penangkapan ikan belum mengedepankan kaidah-kaidah pemanfaatan yang bertanggung jawab yang bisa disebabkan oleh ketidaktahuan, ketidakpedulian, dan ketiadaan perangkat hukum/kebijakan yang jelas dalam pengelolaan rumpon dalam pemanfaatan sumberdaya ikan di laut.

Perangkat hukum/penggunaan teknologi rumpon merupakan hal yang sangat penting untuk maksud tersebut karena menjadi panduan bagi stakeholders terkait dalam mengelola, memanfaatkan, dan menindak pelanggar pemanfaatan. Kebijakan pengelolaan yang tegas dan jelas akan melindungi semua komponen pengelolaan baik pelaku pemanfaatan, sumberdaya ikan, habitat, maupun lingkungan sekitar sehingga terjadi keberlanjutan hingga generasi yang akan datang. Kebijakan pengelolaan tersebut harus mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan dan keterpaduan. Berdasarkan prapenelitian, bahwa dimensi yang harus dipertimbangkan dan dikelola secara terpadu dalam pengelolaan rumpon di Kabupaten Banyuwangi adalah dimensi ekologi, ekonomi, teknologi dan sosial. Sedangkan saat ini pengelolaan rumpon di perairan Pesanggaran belum

mengakomodir dan memadukan dimensi tersebut antara lain berkaitan dengan kesesuaian karakteristik perairan, zonasi, daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan habitat hidup ikan sasaran, dan lain-lain. Dimensi ekonomi belum diketahui secara mendalam terutama berkaitan dengan manfaat finansial bagi nelayan atau pengusaha perikanan serta kontribusinya dalam meningkatkan kondisi ekonomi lokasi penelitian. Pengelolaan rumpon juga belum maksimal memperhatikan keselamatan nelayan dalam penangkapan, keamanan produk yang dihasilkan, dan selektifitas terhadap ikan yang dilindungi.

Berdasarkan kajian tersebut maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dijelaskan dengan Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta atau fenomena lain. Metode penelitian adalah kegiatan mengkaji suatu masalah secara teliti dan teratur, dengan cara menyusun gagasan yang terarah dan terkonsep untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat atau penelitian itu sendiri. Metode penelitian berkaitan dengan pengolahan data yang diperoleh, bila data yang diperoleh tidak memenuhi syarat atau tidak mengenai sasaran akan memungkinkan munculnya permasalahan baru.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moelong (2006) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti. Untuk menjelaskan fenomena yang ada diperlukan suatu metode yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Menurut Withney (dalam Nasir, 2000: 63-64) :

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pasanggaran Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2005-2013. Pemilihan Kabupaten Banyuwangi sebagai objek penelitian karena Kabupaten

Banyuwangi sebagai obyek penelitian dengan melakukan penelitian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer (data asli) adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara wawancara langsung dengan informan, data ini yang nantinya akan dianalisis dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber utama, melainkan dari pihak-pihak lain ataupun dari data dokumentasi/arsip. Data ini meliputi data perikanan, data hasil nelayan dan data lain yang menunjang penelitian ini.

3.4 Metode Penentuan Informan

Informan adalah orang yang bisa dimintai keterangan dan bisa menggambarkan situasi dan objek penelitian. Menurut Ridjal dalam Bungin (2004:221), informan adalah mereka yang dipandang oleh peneliti mengenali dan memahami fenomena penelitian atau mereka yang terlibat dalam peristiwa yang dijadikan data di lapangan.

Metode untuk menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode bola salju (*snowball*). Kuntjoro (2004:52) menyatakan bahwa:

“*Snowball* adalah tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian sampel ini menjadi lebih banyak yang dikembangkan oleh sampel pertama, begitu seterusnya seperti bola salju yang mengelinding makin lama makin besar”

Sedangkan menurut Wahyudi (2010:10) menyatakan:

“Tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama dipilih satu atau dua orang, kemudian melengkapi dengan jumlah sampel berikutnya”

Metode bola salju pada umumnya dilakukan dengan menentukan satu atau beberapa informan untuk diwawancarai dan informan tersebut berperan sebagai titik awal terhadap penentuan informan berikutnya. Dalam memperoleh informasi yang mendalam, penulis tidak membatasi terlebih dahulu jumlah informannya dan informasi sudah dianggap cukup apabila pertanyaan yang diulang dan menghasilkan jawaban yang sama dari informan serta berada pada tingkat jenuh. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan informan primer yang merupakan pedagang nelayan tangkap dan informan sekunder yang merupakan keluarga nelayan dan perugas TPI Pancer.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sumber pustaka dan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat, mencatat, dan menganalisis data sekunder yang ada di TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pasanggaran Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan dengan cara pengambilan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, serta sumber literatur-literatur lain yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

a. Teknik Wawancara

Wawancara menurut Moeleong (2010: 186) adalah “percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Wawancara bukan sekedar upaya Tanya jawab untuk memperoleh informasi saja melainkan juga upaya untuk memperoleh kesan langsung dari informan baik lewat gesture maupun tutur kata, memancing jawaban informan, menilai kebenaran jawaban yang diberikan dan bilamana perlu memberikan penjelasan tentang pertanyaan yang diajukan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, wawancara dilakukan oleh penulis secara terbuka dan terarah dengan menggunakan pedoman wawancara, berhadapan, serta dalam keadaan dan suasana yang mendukung seperti waktu yang cukup untuk dilaksanakannya proses wawancara

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan melihat buku-buku, laporan-laporan dan literatur yang bersifat dokumen, yang dicatat guna dijadikan sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer yang tentunya didasarkan dengan tujuan penelitian dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Faisal (1990:81) yang disebut dokumen (*document*) ialah semua jenis rekaman/catatan sekunder lainnya, seperti surat-surat, memo/nota, pidato-pidato, buku harian, foto-foto, kliping berita koran, hasil-hasil penelitian, agenda kegiatan. Dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi dan didukung oleh sumber-sumber yang representatif.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian terutama jika untuk memperoleh data kesimpulan yang tegas dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Moleong (2010) berpendapat bahwa analisis data adalah proses pengorganisasian data kedalam pola, kategori dan satuan variasi dasar sehingga dapat diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti disarankan oleh data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya menurut Nasir (2000:63) “Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu: (Irawan, 2006:76)

a. Pengumpulan data mentah

Pada tahap ini dikumpulkan melalui berbagai cara yaitu melakukan observasi kemudian menggambarkan lingkungan dan kondisi informan dari usia, pendidikan dan lain-lain. Data yang diperoleh dari informan merupakan data yang berasal dari jawaban informan terhadap wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

b. Transkrip data

Tahap ini dilakukan dari observasi lapangan, wawancara, ataupun pustaka yang dirubah dalam bentuk tertulis yang kemudian dilakukan dengan mengetik secara rapi bentuk transkrip wawancara. Hasil wawancara yang diperoleh dari informan dirubah dalam bentuk tulisan sesuai dengan nama informan-informannya dan sesuai dengan jawaban dari informan baik informan utama maupun informan tambahan.

c. Penyimpulan sementara

Tahap ini adalah tahap pengambilan kesimpulan yang bersifat sementara dan semua berdasarkan data yang diperoleh mengenai kondisi sosial ekonomi. Kesimpulan sementara dilakukan dengan mengkaji data informan yang telah sesuai dengan pedoman wawancara disimpulkan sementara secara keseluruhan.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check dan recheck antara satu sumber data dengan data yang lainnya. Misalnya hasil wawancara dengan hasil observasi lalu dengan hasil dokumentasi. Triangulasi dilakukan dengan memilih data yang sesuai antar informan satu dengan informan yang lain. Selain itu, proses triangulasi dilakukan dengan merecek informasi dari informan tambahan sehingga sumber yang diperoleh benar-benar akurat.

e. Penyimpulan akhir

Tahap ini diambil diambil dengan merangkum dari proses keseluruhan analisis data. Kesimpulan akhir diambil ketika sudah merasa jenuh kemudian membuat kesimpulan akhir dengan mengamati data-data yang diperoleh dari informan. Hasil data yang telah akurat dikaji dan dijelaskan secara keseluruhan sampai kemudian diambil kesimpulan akhir berdasarkan tujuan penelitian dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya untuk meningkatkan derajat kepercayaan data menggunakan keabsahan data, Moleong (2010:170) menyatakan

bahwa: “Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengarahkan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif”.

Teknik yang digunakan dalam keabsahan data adalah Trianggulasi. Moleong (2010:178) mengatakan bahwa “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dari penjelasan diatas sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara. Pengamatan dilakukan sebelumnya berupa observasi secara langsung oleh peneliti di lapangan, mengamati aktivitas nelayan dan melakukan perbandingan dengan hasil wawancara untuk mendapatkan kesesuaian dan keabsahan data.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Hasil wawancara yang diperoleh dari informan secara pribadi dengan informasi secara keseluruhan dari nelayan yang lain.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Proses keabsahan data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara informan dengan informasi secara umum dan didukung dengan hasil wawancara dari informan tambahan.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil wawancara dari informan disesuaikan dengan keadaan nelayan dengan beberapa pendapat dari informan satu terhadap informan yang lain.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Perubahan kelembagaan nelayan dalam ketebaharuan tehnologi rumpon nelayan tangkap TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 2 tahap yaitu:

► 1998 - 2008

Pada rentang tahun 1998-2008 pengembangan rumpon di Pancer diusahakan dan dimotori oleh pengambek. Hubungan Nelayan dan Pengambek merupakan hubungan antara Juragan dan buruh yang didominasi hubungan hutang piutang. Saat itu belum ada asosiasi nelayan sehingga peran pengambek sangat menentukan. Pengambek membuat aturan yang berlaku internal pada anggotanya dan bersifat otoriter karena pengambek sebagai pemodal dan penguasa aset. Aturan ini meliputi hutang piutang, harga ikan, operasional penangkapan ikan di rumpon dll. Pengambek juga berperan pada penyelesaian konflik internal dan eksternal yang melibatkan nelayan di Pancer

► 2008 - 2016

Pada rentang tahun 2008-2016 sudah terbentuk kelompok nelayan yang mengusahakan rumpon secara *urunan*. Kelompok bermusyawarah dalam pengambilan keputusan dan pembuatan aturan yang berlaku internal. Aturan meliputi pembuatan rumpon, penempatan rumpon, pemanfaatan rumpon dan aturan lain tentang permasalahan rumpon kelompok. Ketua kelompok yang umumnya merupakan tokoh nelayan berperan dalam penyelesaian konflik internal dan eksternal dalam permasalahan nelayan Pancer

- b. Dampak ketebaharuan tehnologi rumpon yang disertai perubahan kelembagaan nelayan rumpon terhadap tingkat kesejahteraan nelayan tangkap TPI Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten

Banyuwangi dimana nelayan yang menggunakan teknologi rumpon (rumpungan) mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dari pada nelayan lainnya. Penghasilan nelayan rumpungan untuk memenuhi keperluan keluarga semakin baik saat terjadi perubahan kelembagaan nelayan rumpon.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat dijelaskan antara lain:

- a. Pihak pemerintah hendaknya mendukung dan memperkuat kelembagaan nelayan khususnya nelayan rumpon di TPI Pancer melalui pemberdayaan nelayan. Langkah ini dapat ditempuh dengan pemberian hibah kepada kelompok nelayan, peningkatan pengetahuan nelayan dan penguatan modal kelompok dan diharapkan kelompok nelayan menjadi kelompok mandiri.
- b. Peningkatan kesejahteraan melalui pendapatan nelayan *rumpungan* dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan diupayakan dengan cara mengembangkan Alternatif Mata Pencaharian (AMP) bagi keluarga nelayan melalui kegiatan pada agroindustri perikanan dan non perikanan, juga memperbaiki perundangan dan peraturan daerah tentang sistem Bagi Hasil berdasarkan kelembagaan dan kearifan lokal yang ada.
- c. Peningkatan pendapatan rumahtangga nelayan dalam hal pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan jangkauan 35-200 mil laut dengan kebijakan pengembangan teknologi alat tangkap yang ramah lingkungan, juga kebijakan pengaturan tentang sistem penetapan upah minimum bagi ABK

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, K. 2012. Model Pemberdayaan Petani-Nelayan Berbasis Kelembagaan Lokal Dan Keunikan Agro Ekosistem Untuk Peningkatan Daya Saing Dan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 8 No.2 Hal.1-24
- Anyonge, Tom. 2013. *An Analysis of Lessons Learnt from Field Application of IFAD's Sourcebook on Institutional and Organizational Analysis for Pro-Poor Change*. International Fund for Agricultural Development (IFAD).
- Arifin, T. 2008. *Pengaturan Kepadatan Rumpon Bagi nelayan*. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Budiono. 2006. *Ekonomi Mikro Seri Sinopsis: Pengantar Ilmu Ekonomi No.1*. BPFE, Yogyakarta
- Bungin Burhan. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit: PT Rajagrafindo. Persada, Jakarta.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Gelora Akasara Pratama.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2014. *Laporan Tahunan 2014*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi: Banyuwangi.
- Djogo, Tony; Sunaryo, Didik Suharjito dan Martua Sirait. 2003. *Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Elesh, David. 1970. *Poverty Theories and Income Maintenance: Validity and Policy Relevance*. University of Wisconsin.
- Elier, E. 2007. *Kajian teknologi penangkapan ikan yang memberi pendapatan nelayan yang layak di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu Sukabumi*. Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Elizabeth, R dan Darwis, V., 2003. *Karakteristik Petani Miskin dan Persepsinya Terhadap Program JPS di Propinsi Jawa Timur*. Bali: SOCA.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh (YA3 Malang)
- Fauzi, A. dan S. Anna. 2005. *Permodelan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gakuru, Rhoda dan Mathenge, Naomi. 2012. *Poverty, Growth, and Income Distribution in Kenya: A SAM Perspective*. AGRODEP Working Paper 0001 June 2012.

- Hanafiah dan Saefuddin. 2000. *Tataniaga Hasil Perikanan*. UI Press. Jakarta
- Hira, Anil & Ron, Hira. 2000. The Institutionalism: Contradictory Notions of Change. *American Journal of Economics and Sociology*. Vol 59 No 2, April: 267-282.
- Hodgson, Geoffrey M. 1998. The Approach of Institutional Economics. *Journal of Economic Literature* Vol. XXXVI (March 1998), pp. 166–192.
- Hubbard, Michael. 1997. The New Institutional Economics' In Agricultural Development: Insights And Challenges. *Journal of Agricultural Economics* 48 (2) (1997) 239-249.
- Hubbard, Michael. 1997. The 'New Institutional Economics' In Agricultural Development: Insights And Challenges. *Journal of Agricultural Economics* 48 (2) (1997) 239-249.
- Imron, M. dan M.S. Baskoro. 2006. *Rekayasa Teknik dan Quality Control Api dan Rumpon untuk Laut Dalam, Rangka Akselerasi Pembangunan perikanan Tangkap di Pantai Selatan Jawa Barat*. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK-IPB, dan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat
- Irawan, Prasetya. 2009. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Jusuf, I. 1999. *Buku Satu, Auditing Pendekatan Terpadu, Jakarta : Salemba Empat*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2008. *Statistik Perikanan Tangkap*. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan: Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2010. *Rencana Tindak Pengembangan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap Kabupaten Banyuwangi-Propinsi Jawa Timur*. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP-RI: Jakarta.
- Lipton, M dan Ravallion, M. 1994. *Poverty and Policy*. Washington DG. The World Bank
- Lissowska, Maria. 2006. New Research Problems for Institutional Economics Arising from The Experience of Transition to A Market Economy: The Evolution of Institutions. *Journal of Economics and Business* Vol. IX – 2006, No 2 (53-80).
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta

- Moleong, Lexi J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexi J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Monintja, Daniel. 1993. *Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Monintja, R.D. dan Zulkarnain. 1995. Analisis Dampak Pengoperasian Rumpon di Perairan ZEE terhadap perikanan cangkang di perairan Selatan Jawa dan Utara Sulawesi. Laporan penelitian : Bogor: IPB
- Mubyarto., 1994, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Muflikhati, Istiqiyah. 2010. *Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga : Kasus Di Wilayah Pesisir Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mulyana, R. 1994. *Pendugaan Kelimpahan Ikan Pelagis Kecil Dengan Menggunakan Sistem Akustik Bim Ganda di Perairan Utara Pekalongan*. Tesis. ITK, Fakultas Perikanan Ilmu dan Kelautan, Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Naamin, N. 1987. Perikanan Laut di Indonesia : Prospek dan Problema Pengembangan Sumberdaya Perikanan Laut. Seminar Laut Nasional II, Jakarta.
- Nahib, S. 2007. Analisis Dinamik Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tuna Kecil Di Perairan Pelabuhan Ratu. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Nasir, 2000. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Nemarundwe, Nontokozo and Kozanayi, Witness. 2002. *Institutional arrangements for Water Resource Use: A Case Study from Southern Zimbabwe*. Institute of Environmental Studies University of Zimbabwe.
- Nuppenau, Ernst-August. Tanpa Tahun. *Rural Development and The Heritige of Chayanov and Georgescu-Roegen: on Labour Intensive Agriculture and Peasants*. Dep. of Agricultural Policy and Market Research, J.-LiebigUniversity, Giessen, Germany.
- Nybakken, J.W. 1988. *Biologi laut: Suatu Pendekatan Ekologis*. Terjemahan. Dari Marine Biology: An Ecological Approach, oleh Eidman, M., Koesoebiono, D.G. Bengen, M. Hutomo dan Sukardjo. PT Gramedia, Jakarta

- Parada, Jairo J. 2001. Original Institutional Economics: A Theory for the 21st Century?. *Oeconomicus*, Volume V, Fall 2001.
- Preston, K. 1982, *Poverty Theories and Income Maintenance: Validity and Policy Relevance*. *University of Wisconsin* Revisiting the Bridges (Or the Divide). *Oeconomicus*, Volume VI, Fall 2002.
- Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, 2011. *Modul Penangkapan Ikan dengan Pancing Ulur*. Kementrian Kelautan dan Perikanan : Jakarta.
- Putra, A. 2011 *Pemberdayaan Perikanan Rakyat Berdasarkan Analisis Bio-Ekonomi Sumberdaya*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.
- Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 30/MEN/2004 tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia Buku Ajar Perkuliahan.
- Suryawati, C. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. <http://www.jmpk-online.net>
- Williamson, Oliver E. 2000. The New Institutional Economics: Taking Stocks Lookin Ahead. *Journal of Economic Literature* Vol. 38, No 3 Sept 2000, 595 – 613.
- Wiyono, Eko Sri. 2010. *Komposisi, Diversitas dan Produktivitas Sumberdaya Ikan Dasar di Perairan Pantai Cirebon*, Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Zubair, Sofyan. Muhammad Yasin. 2011. *Analisis Pendapatan Nelayan Pada Unit Alat Tangkap Payang Di Desa Pabbaressang Kec. Bua Kab. Luwu*. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Tesis. Universitas Hasanudin. Makassar
- Zulkarnain, K. 2002. *Penggunaan Rumpon Pada Bagan Apung Di Teluk Pelabuhan Ratu, Jawa Barat*. Tesis. ITK, Fakultas Perikanan Ilmu dan Kelautan, Institut Pertanian Bogor: Bogor.

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA INFORMAN**1. SALAMUN**

Berasal dari Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi dengan pekerjaan semula sebagai petani dan pekebun. Pertama kali pindah ke Dusun Pancer Desa Sumberagung pada tahun 1978. Tahun 1978 – 1984 bekerja sebagai ABK (anak buah kapal) armada dengan API (Alat Penangkapan Ikan) Payang. Tahun 1985 – 2000 dipercaya sebagai Juragan Laut (Nahkoda) pada armada dengan API *Gill Net* (jaring insang).

ABPI (Alat Bantu Penangkapan Ikan) RUMPON dikenal oleh nelayan Pancer sekitar tahun 1998. RUMPON ini dikenalkan pertama kali oleh nelayan bugis yang bekerja di perairan kabupaten banyuwangi. Rumpon ditempatkan di areal lebih dari 35 mil dari pantai Pancer yang masuk areal ZEE (Zona Ekonomi Exclusive). Hasil penangkapan ikan dari nelayan bugis yang menggunakan ABPI Rumpon ini didaratkan di TPI Pancer. Setiap armada nelayan bugis saat itu dapat mendaratkan ikan di TPI Pancer sebanyak 45-50 keranjang/trip (setiap trip selama 15 hari) atau \pm 4000 – 5000 kg ikan pelagis besar (Tuna, Cakalan, Lemadang, Tengiri dll) yang mempunyai harga ekonomis tinggi. Karena armada nelayan bugis selalu mendaratkan ikan dalam jumlah besar yang menimbulkan kecemburuan dari nelayan pancer yang hasil penangkapan ikannya tidak pernah sebanyak armada nelayan bugis, akhirnya nelayan pancer melakukan demo yang

menduga nelayan bugis menangkap ikan dengan *Trawl* (pukat harimau) yang dilarang pemerintah. Sedangkan nelayan bugis mengaku menangkap ikan dengan API Pancing dan ABPI Rumpon, yang dianggap nelayan pancer tidak masuk akal karena hasil ikan yang melimpah itu tidak mungkin hasil penangkapan ikan dengan pancing.

Untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran dalam penangkapan ikan (menggunakan *Trawl*), nelayan bugis mempersilahkan nelayan pancer untuk membuktikan sendiri dengan ikut di armada milik nelayan bugis saat melakukan penangkapan ikan. Menurut Pak Salamun nelayan pancer yang ikut armada nelayan bugis adalah Jarwo. Dari keterangan Jarwo ini nelayan pancer percaya bahwa hasil penangkapan ikan yang melimpah dari armada bugis ini memang ditangkap dengan pancing disekitar Rumpon.

Karena hasil yang menjanjikan ini, pada tahun 1999 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan Rumpon Laut Dalam sebanyak 3 unit kepada nelayan Pancer. Rumpon ini dapat dimanfaatkan semua nelayan di pancer sehingga banyak armada pancer yang memanfaatkannya. Karena semua nelayan pancer diperbolehkan menangkap ikan di sekitar Rumpon dan tidak ada yang bertanggung jawab untuk merawat sehingga tidak sampai setahun Rumpon putus.

Pada tahun 1999 Rumpon kedua di Pancer diluncurkan oleh Fauchen dengan Juragan Darat Faushin dan Rumpon tersebut dinamai *Bobo*. Rumpon ini dimanfaatkan oleh 8 armada sekoci baik yang milik Juragan Darat sendiri maupun yang bukan. Semua ikan hasil tangkapan di Rumpon *Bobo* ini harus disetor ke Faushin sebagai pemilik Rumpon tersebut. Harga ikan yang ditangkap di Rumpon tersebut saat itu dikisaran Rp. 10.000 – 11.000/kg. Harga yang ditentukan oleh Juragan Darat ini selisih 20-50% dari harga ikan yang sama diluar Pancer (Puger, Malang dll). Jika ada nelayan protes dengan harga ikan tersebut maka nelayan disuruh mengembalikan hutang ke Juragan Darat jika ada dan tidak diperbolehkan memancing ikan di sekitar Rumpon

Pada Tahun 2000 Rumpon ketiga di Pancer diluncurkan oleh Mbah Udin (Juragan Darat), dengan Juragan Laut (Nahkoda) Pak Husni dan Pak Jarno. Mbah

Udin sebagai Juragan Darat dan pemilik kapal menanggung semua biaya pengadaan rumpon dan semua ikan hasil tangkapan harus diserahkan ke Mbah Udin dengan harga yang sudah ditentukan oleh Juragan Darat. Hasil penangkapan ikan dari Rumpon milik Mbah Udin tersebut sangat memuaskan dan dimanfaatkan oleh armada milik Mbah Udin sendiri.

Tahun 2005 mulai ada pembuatan Rumpon oleh nelayan Pancer dengan sistem urunan (iuran). Biaya pembuatan 1 unit Rumpon sekitar Rp. 30.000.000 – 40.000.000 tergantung kedalaman laut saat penempatan Rumpon. Rumpon ini biasanya dimanfaatkan oleh 5 – 7 sekoci (kapal). Biaya pembuatan Rumpon ini pertama ditanggung oleh *Pengambek* (Pembeli Ikan). Biaya ini akan dibagi rata dengan jumlah sekoci yang memanfaatkan Rumpon tersebut dan dianggap hutang nelayan kepada pengambek. Ikan hasil tangkapan di Rumpon tersebut harus disetor nelayan kepada pengambek. Nelayan akan dipotong dari harga ikan sebesar Rp. 1.000/kg dan dipotong lagi untuk angsuran hutang biaya Rumpon. Setelah hutang nelayan untuk pembuatan Rumpon dianggap lunas, maka nelayan bebas menjual ikan hasil tangkapan di Rumpon tersebut kepada *Pengambek* atau *Bakul* lain.

Karena dianggap masih kurang menguntungkan bagi nelayan maka mulai tahun 2008 nelayan mulai berkelompok untuk pembuatan Rumpon Laut Dalam. Rumpon ini langsung dibiayai oleh urunan (iuran) dari Kelompok Nelayan ini. Kelompok nelayan Pancer yang pertama kali membuat rumpon sendiri adalah kelompok Pak Husni. Pak Husni meniru nelayan Sendangbiru Malang yang membentuk kelompok sendiri dan lepas dari pengambek untuk membuat rumpon dengan cara urunan. Satu kelompok nelayan yang memanfaatkan Rumpon biasanya 4-5 armada. Satu armada biasanya mempunyai saham di 2 unit Rumpon untuk memaksimalkan ikan hasil tangkapan tiap tripnya. Biaya pembuatan 1 unit Rumpon saat ini berkisar Rp. 40.000.000 – 50.000.000. Biaya pembuatan Rumpon ini harus sudah dibayarkan oleh tiap armada/sekoci yang ikut dalam kelompok sebelum Rumpon diluncurkan. Ikan hasil tangkapan di Rumpon tersebut bebas dijual oleh masing-masing armada/sekoci ke pengambek, bakul atau pembeli lainnya. Karena hasil ikan yang menjanjikan maka nelayan rumpon

mempunyai *bargaining power* kepada pengambek walaupun punya hutang. Karena pengambek tidak mau nelayan rumpon membayar hutangnya dan beralih ke orang lain.

Aturan main dari kelompok nelayan rumpon ini adalah sebagai berikut:

- a. Rumpon adalah aset kelompok
- b. Armada/Sekoci yang boleh menangkap ikan di Rumpon adalah armada yang mempunyai andil berupa iuran (iuran) untuk pembuatan Rumpon
- c. Armada/Sekoci lain yang tidak ikut iuran tidak diperbolehkan melakukan *kentil* (menambatkan armada/sekoci karena dapat mengurangi usia pakai Rumpon/putus) dan menangkap ikan di Rumpon (walau masih ada hubungan saudara)
- d. Iuran dibayarkan oleh anggota kelompok nelayan rumpon sebelum peluncuran (karena ada resiko hilang, putus dan sedikit ikan setelah rumpon diluncurkan)
- e. Semua armada/sekoci anggota kelompok nelayan rumpon mempunyai kewajiban untuk melakukan perawatan secara bersama-sama
- f. Semua armada/sekoci anggota kelompok nelayan rumpon harus mau diatur bergiliran saat melakukan penangkapan ikan di Rumpon tersebut sehingga Rumpon selalu ada armada yang melakukan penangkapan ikan (tidak kosong). Hal ini dilakukan untuk menjaga rumpon agar tidak dimanfaatkan oleh nelayan lain atau diputus oleh kapal ikan besar.

Menurut Pak Salamun, ABPI Rumpon ini sangat cocok di gunakan di daerah Pancer dan sekitarnya. Karena dengan Rumpon ini tidak mengenal musim ikan dan dapat melakukan penangkapan ikan sepanjang tahun. Kendala hanya pada cuaca yang buruk pada bulan Desember sampai Maret, tetapi nelayan Rumpon masih bisa beroperasi walaupun tidak bisa rutin. Selain itu Nelayan Rumpon tidak pernah bergesekan atau ada konflik dengan nelayan lain karena areal tangkapnya yang berbeda dimana nelayan lain menangkap ikan di bawah 15

mil sedangkan nelayan rumpon diatas 25 mil dari pantai pancer. Nelayan Rumpon mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dari pada nelayan lain itu tampak dari aset yang dimiliki nelayan rumpon. Rumpon Laut Dalam sangat mempengaruhi produksi dan pendapatan dari Nelayan Rumpon pada khususnya dan masyarakat Pancer pada umumnya.

2. SUJARNO

Mulai tahun 1990 saat berumur 14 tahun, Pak Sujarno bekerja sebagai ABK armada dengan API (Alat Penangkapan Ikan) Payang milik Mbah Udin sampai tahun 1995. Tahun 1995 – 1998 dipercaya sebagai Juragan Laut (Nahkoda) pada armada dengan API *Gill Net* (jaring insang) milik Mbah Udin. Kemudian mulai tahun 1999, armada yang di nahkodai mulai memanfaatkan Rumpon. Pak Sujarno adalah salah satu pioner dari nelayan Pancer yang memanfaatkan dan menggunakan Rumpon saat aktivitas menangkap ikan.

Karena ada permintaan dari nelayan dan hasil ikan dari Rumpon yang menjanjikan, maka pada tahun 1999 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan Rumpon Laut Dalam sebanyak 3 unit kepada nelayan Pancer. Rumpon ini dapat dimanfaatkan semua nelayan di pancer sehingga banyak armada pancer yang memanfaatkannya. Karena semua nelayan pancer diperbolehkan menangkap ikan di sekitar Rumpon dan tidak ada yang bertanggung jawab untuk merawat sehingga tidak sampai setahun Rumpon putus.

Pada tahun 1999 Rumpon kedua di Pancer diluncurkan oleh Fauchen dengan Juragan Darat Faushin dan Rumpon tersebut dinamai *Bobo*. Rumpon ini dimanfaatkan oleh 8 armada/sekoci baik yang milik Juragan Darat sendiri maupun yang bukan. Semua ikan hasil tangkapan di Rumpon *Bobo* ini harus disetor ke Faushin sebagai pemilik Rumpon tersebut. Harga ikan yang ditangkap di Rumpon tersebut saat itu dikisaran Rp. 10.000 – 11.000/kg. Harga yang ditentukan oleh Juragan Darat ini selisih 20-50% dari harga ikan yang sama diluar Pancer (Puger, Malang dll). Jika ada nelayan protes dengan harga ikan tersebut maka nelayan disuruh mengembalikan hutang ke Juragan Darat jika ada dan tidak diperbolehkan

memancing ikan di sekitar Rumpon

Pada Tahun 2000 Rumpon ketiga di Pancer diluncurkan oleh Mbah Udin (Juragan Darat), yang diperuntukkan kepada armada milik Mbah Udin yaitu Armada dengan Nahkoda Pak Sujarno dan Pak Husni bersama 6 armada lainnya. Mbah Udin sebagai Juragan Darat dan pemilik 8 armada/sekoci menanggung semua biaya pengadaan rumpon dan semua ikan hasil tangkapan harus diserahkan ke Mbah Udin dengan harga yang sudah ditentukan oleh Juragan Darat. Biaya pembuatan Rumpon tersebut dianggap sebagai hutang dari 8 armada/sekoci (yang memanfaatkannya) kepada Mbah Udin sebagai Juragan Darat. Karena dianggap hutang maka ke 8 armada/kapal tersebut akan dipotong hasil penjualan ikan yang dibeli oleh Mbah Udin sebagai Juragan Darat. Jumlah ABK di setiap armada/sekoci tersebut sebanyak 4 orang dengan 1 orang Nahkoda. Pembagian hasil aktivitas penangkapan ikan adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah	Bagian
Juragan Darat (Pemilik Sekoci)	1	4 bagian
Juragan Laut (Nahkoda)	1	2 bagian
ABK (Anak Buah Kapal)	4	4 bagian

Jumlah uang yang dibagikan dan diterima oleh masing-masing orang adalah dihitung dari hasil bersih penjualan ikan setelah dipotong biaya operasional. Juragan Darat selain mendapat hasil paling besar, akan mendapat tambahan keuntungan pembelian ikan dari 8 armada/sekoci yang harga ikannya sudah ditentukan. Padahal saat itu selisih harga ikan di Pancer dengan daerah lain berkisar 20 – 50 % lebih rendah. Sehingga nelayan sulit untuk mendapat hasil yang berlebih, tetapi malah hutang kepada Juragan Darat yang akan terus bertambah dan tidak bisa dilunasi.

Pak Sujarno menjadi Nahkoda armada/sekoci Rumpon (*Rumpungan*) milik Mbah Udin dari tahun 1999 – 2004. Dari pengalaman sebagai nelayan Rumpon (*Rumpungan*) yang hasilnya menjanjikan, maka pada akhir tahun 2004 Pak Sujarno memberanikan diri membeli sekoci dari Pak Husni dengan cara hutang. Menurut Pak Sujarno tahun 2005 mulai ada pembuatan Rumpon oleh nelayan Pancer dengan sistem urunan (iuran) dan Pak Sujarno mulai ikut berkelompok

dengan 6 armada/sekoci lainnya untuk memanfaatkan 1 unit rumpon. Saat itu masing-masing sekoci membayar Rp. 5.000.000 untuk biaya iuran pembuatan Rumpon. Biaya pembuatan Rumpon ini pertama ditanggung oleh *Pengambek* (Pembeli Ikan). Biaya ini akan dibagi rata dengan jumlah sekoci yang memanfaatkan Rumpon tersebut dan dianggap hutang nelayan kepada pengambek. Ikan hasil tangkapan di Rumpon tersebut harus disetor nelayan kepada pengambek. Nelayan akan dipotong dari harga ikan sebesar Rp. 1.000/kg dan dipotong lagi untuk angsuran hutang biaya Rumpon. Setelah hutang nelayan untuk pembuatan Rumpon dianggap lunas, maka nelayan bebas menjual ikan hasil tangkapan di Rumpon tersebut kepada *Pengambek* atau *Bakul* lain.

Karena dianggap masih kurang menguntungkan bagi nelayan maka mulai tahun 2009, Pak Sujarno membuat kelompok sendiri untuk pembuatan Rumpon Laut Dalam. Rumpon ini langsung dibiayai oleh urunan (iuran) dari Kelompok Nelayan ini. Satu kelompok nelayan yang memanfaatkan Rumpon biasanya 4-5 armada. Satu armada biasanya mempunyai saham di 2 unit Rumpon untuk memaksimalkan ikan hasil tangkapan tiap tripnya. Biaya pembuatan 1 unit Rumpon saat ini berkisar Rp. 40.000.000 – 50.000.000. Biaya pembuatan Rumpon ini harus sudah dibayarkan *cash* oleh tiap armada/sekoci yang ikut dalam kelompok sebelum Rumpon diluncurkan. Ikan hasil tangkapan di Rumpon tersebut bebas dijual oleh masing-masing armada/sekoci ke pengambek, bakul atau pembeli lainnya. Karena hasil ikan yang menjanjikan maka nelayan rumpon mempunyai *bargaining power* kepada pengambek walaupun punya hutang. Karena pengambek tidak mau nelayan rumpon membayar hutangnya dan beralih ke orang lain.

Aturan main dari kelompok nelayan rumpon ini adalah sebagai berikut:

- a. Rumpon adalah aset kelompok
- b. Armada/Sekoci yang boleh menangkap ikan di Rumpon adalah armada yang mempunyai andil berupa urunan (iuran) untuk pembuatan Rumpon
- c. Armada/Sekoci lain yang tidak ikut iuran tidak diperbolehkan melakukan *kentil* (menambatkan armada/sekoci karena dapat mengurangi usia pakai Rumpon/putus) dan menangkap ikan di Rumpon

(walau masih ada hubungan saudara)

- d. Iuran dibayarkan oleh anggota kelompok nelayan rumpon sebelum peluncuran (karena ada resiko hilang, putus dan sedikit ikan setelah rumpon diluncurkan)
- e. Semua armada/sekoci anggota kelompok nelayan rumpon mempunyai kewajiban untuk melakukan perawatan secara bersama-sama
- f. Semua armada/sekoci anggota kelompok nelayan rumpon harus mau diatur bergiliran saat melakukan penangkapan ikan di Rumpon tersebut sehingga Rumpon selalu ada armada yang melakukan penangkapan ikan (tidak kosong). Hal ini dilakukan untuk menjaga rumpon agar tidak dimanfaatkan oleh nelayan lain atau diputus oleh kapal ikan besar.

Dari hasil kerja kerasnya, saat ini Pak Sujarno mempunyai 4 sekoci Rumpon (*rumpungan*) yang salah satunya di Nahkodai sendiri. Karena tidak mempunyai hutang di *pengambek*, ikan hasil tangkapan dari ke 4 sekoci ini dijual bebas. Biasanya untuk ikan cakalan dan *baby tuna* yang berukuran kecil dijual ke pengambek antara lain Faushin, HJ. Fatimah dan Pak Tari. Sedangkan ikan tangkapan yang berukuran besar (Tuna dan Lemadang) serta mempunyai nilai ekonomis tinggi saat ini dijual kepada PT. GSM (Giovani Sukses Makmur) sebuah perusahaan eksportir dari Surabaya yang menempatkan armada angkutnya di TPI Pancer. Harga pembelian dari PT. GSM ini sangat baik dengan selisih sampai Rp. 7.000/kg lebih tinggi dari pada *pengambek* dan bakul di Pancer. Penjualan ikan ke PT. GSM dari kelompok Pak Sujarno ini merupakan pioner dan menjadi contoh bagi nelayan Rumpon lainnya di Pancer yang selama ini menjual ikan tangkapannya ke pengambek dan bakul, sehingga kelompok nelayan lainnya ingin mengikuti jejak kelompok Pak Sujarno.

Menurut Pak Sujarno, ABPI Rumpon ini sangat cocok di gunakan di daerah Pancer dan sekitarnya yang merupakan perikanan lepas pantai (*off shore*). Perikanan tangkap di Pancer identik dengan perikanan Rumpon (*rumpungan*) dan produksi penangkapan ikannya sangat dipengaruhi hasil penangkapan ikan dengan ABPI Rumpon. Karena dengan Rumpon ini tidak mengenal musim ikan dan dapat

melakukan penangkapan ikan sepanjang tahun yang mana akan mempunyai pengaruh yang besar pada produksi ikan hasil penangkapan ikan di TPI Pancer. Saat musim lemuru di perairan Pancer dan sekitarnya pada bulan Mei - November, biasanya ada puluhan armada slerek dengan API *Purse Seine* yang berasal dari Muncar melakukan penangkapan ikan dan bersandar di PP. Pancer. Dengan ramainya aktivitas perikanan tangkap di PP. Pancer ini, sampai saat ini Nelayan Rumpon tidak pernah bergesekan atau ada konflik dengan nelayan slerek dari Muncar dan nelayan lain yang berasal dari Pancer sendiri karena areal tangkapnya yang berbeda dimana nelayan lain menangkap ikan di bawah 15 mil sedangkan nelayan rumpon diatas 25 mil dari pantai pancer. Tetapi masih ada gesekan atau konflik antara nelayan Rumpon (*rumpungan*) Pancer dengan nelayan Rumpon yang berasal dari Pekalongan dan Cilacap dengan armada besar (> 30 GT) yang menggunakan API *Trawl*. Konflik ini diakibatkan nelayan Pekalongan dan Cilacap ini menempatkan Rumpon berdekatan dengan rumpon milik nelayan Pancer yaitu di area 40 – 45 mil. Padahal sebelumnya penempatan rumpon milik nelayan Pekalongan dan Cilacap ini di atas 60 mil. Armada-armada ini melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjungwangi, Ketapang.

Menurut Pak Sujarno, nelayan Rumpon (*rumpungan*) mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dari pada nelayan lain itu yang salah satunya tercermin dari keberhasilan Pak Sujarno sendiri. Tingkat ekonomi nelayan Rumpon akan lebih baik lagi jika harga ikan di Pancer tidak berbeda jauh dari harga di daerah penangkapan ikan lainnya, sehingga pendapatan nelayan rumpon di pancer akan meningkat. Salah satu solusi adalah adanya pembeli ikan dari luar Pancer baik berbentuk korporasi maupun perorangan, sehingga terjadi persaingan antar pembeli yang berdampak pada baiknya harga ikan yang diterima nelayan.

3. SUTOPO



Mulai tahun 1990 saat berumur 15 tahun, Pak Sutopo bekerja sebagai ABK armada dengan API *Gill Net* (jaring insang) milik Faushin. Tahun 1996 – 1999 dipercaya sebagai Juragan Laut (Nahkoda) pada armada dengan API *Gill Net* (jaring insang) milik Faushin. Kemudian mulai tahun 1999, armada yang di nahkodai mulai memanfaatkan Rumpon. Pak Sutopo adalah salah satu pioner dari nelayan Pancer yang memanfaatkan dan menggunakan Rumpon saat aktivitas menangkap ikan.

ABPI (Alat Bantu Penangkapan Ikan) RUMPON dikenal oleh nelayan Pancer sekitar tahun 1998. RUMPON ini dikenalkan pertama kali oleh nelayan bugis yang bekerja di perairan kabupaten banyuwangi. Rumpon ditempatkan di areal lebih dari 35 mil dari pantai Pancer yang masuk areal ZEE (Zona Ekonomi Exclusive). Hasil penangkapan ikan dari nelayan bugis yang menggunakan ABPI Rumpon ini didaratkan di TPI Pancer. Setiap armada nelayan bugis saat itu dapat mendaratkan ikan di TPI Pancer sebanyak 45-50 keranjang/trip (setiap trip selama 15 hari) atau \pm 4000 – 5000 kg ikan pelagis besar (Tuna, Cakalan, Lemadang, Tengiri dll) yang mempunyai harga ekonomis tinggi. Karena armada nelayan bugis selalu mendaratkan ikan dalam jumlah besar yang menimbulkan kecemburuan dari nelayan pancer yang hasil penangkapan ikannya tidak pernah sebanyak armada nelayan bugis, akhirnya nelayan pancer melakukan demo yang menduga nelayan bugis menangkap ikan dengan *Trawl* (pukat harimau) yang dilarang pemerintah. Sedangkan nelayan bugis mengaku menangkap ikan dengan

API Pancing dan ABPI Rumpon, yang dianggap nelayan pancer tidak masuk akal karena hasil ikan yang melimpah itu tidak mungkin hasil penangkapan ikan dengan pancing.

Untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran dalam penangkapan ikan (menggunakan *Trawl*), nelayan bugis mempersilahkan nelayan pancer untuk membuktikan sendiri dengan ikut di armada milik nelayan bugis saat melakukan penangkapan ikan. Menurut Pak Sutopo nelayan pancer yang ikut salah satu armada nelayan bugis adalah Agus. Dari keterangan Agus ini nelayan pancer percaya bahwa hasil penangkapan ikan yang melimpah dari armada bugis ini memang ditangkap dengan pancing disekitar Rumpon.

Karena hasil yang menjanjikan ini, pada tahun 1999 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan Rumpon Laut Dalam kepada nelayan Pancer. Rumpon ini dapat dimanfaatkan semua nelayan di pancer sehingga banyak armada pancer yang memanfaatkannya. Karena semua nelayan pancer diperbolehkan menangkap ikan di sekitar Rumpon dan tidak ada yang bertanggung jawab untuk merawat sehingga tidak sampai setahun Rumpon putus.

Pada tahun 1999 Rumpon kedua di Pancer diluncurkan oleh Fauchen dengan Juragan Darat Faushin. Karena nelayan Pancer belum berpengalaman maka penempatan Rumpon ini dibantu oleh Nelayan Rumpon Bugis dan Rumpon tersebut dinamai *Bobo*. Pak Sutopo menjadi salah satu nelayan yang ikut melakukan penempatan Rumpon yang dinamai *Bobo* ini. Rumpon ini dimanfaatkan oleh 8 armada sekoci dimana 3 sekoci milik Faushin yang salah satunya di Nahkodai oleh Pak Sutopo. Semua ikan hasil tangkapan di Rumpon *Bobo* ini harus disetor ke Faushin sebagai pemilik Rumpon tersebut. Harga ikan yang ditangkap di Rumpon tersebut saat itu dikisaran Rp. 10.000 – 11.000/kg. Harga yang ditentukan oleh Juragan Darat ini selisih 20-50% dari harga ikan yang sama diluar Pancer (Puger, Malang dll). Jika ada nelayan protes dengan harga ikan tersebut maka nelayan disuruh mengembalikan hutang ke Juragan Darat jika ada dan tidak diperbolehkan memancing ikan di sekitar Rumpon.

Pak Sutopo bekerja sebagai nelayan Rumpon (*rumpungan*) pada posisi nahkoda di sekoci milik Faushin sampai tahun 2009. Kemudian menjadi nahkoda

di sekoci milik pak Sugeng sampai tahun 2012 juga sebagai nelayan Rumpon (*rumpunga*). Pada tahun 2012 Pak Sutopo membeli sekoci dan di nahkodai sendiri bersama 4 orang ABK sampai saat ini. Tahun 2012-2014 Pak Sutopo berkelompok dalam pemanfaatan 1 unit Rumpon bersama 6-7 armada/sekoci. Saat ini dalam pemanfaatan Rumpon, Pak Sutopo berkelompok dengan 4-5 armada/sekoci, agar hasil ikan tangkapan lebih banyak dan pendapatan anggota kelompok lebih meningkat dan memuaskan. Iuran untuk biaya pembuatan dan penempatan 1 unit Rumpon sekitar Rp. 10.000.000/sekoci. Saat ini sekoci milik Pak Sutopo mempunyai 2 unit Rumpon yang dibiayai secara berkelompok.

Aturan main dari kelompok nelayan rumpon ini adalah sebagai berikut:

- a. Rumpon adalah aset kelompok
- b. Armada/Sekoci yang boleh menangkap ikan di Rumpon adalah armada yang mempunyai andil berupa urunan (iuran) untuk pembuatan Rumpon
- c. Armada/Sekoci lain yang tidak ikut iuran tidak diperbolehkan melakukan *kentil* (menambatkan armada/sekoci karena dapat mengurangi usia pakai Rumpon/putus) dan menangkap ikan di Rumpon (walau masih ada hubungan saudara)
- d. Iuran dibayarkan oleh anggota kelompok nelayan rumpon sebelum peluncuran (karena ada resiko hilang, putus dan sedikit ikan setelah rumpon diluncurkan)
- e. Semua armada/sekoci anggota kelompok nelayan rumpon mempunyai kewajiban untuk melakukan perawatan secara bersama-sama
- f. Semua armada/sekoci anggota kelompok nelayan rumpon harus mau diatur bergiliran saat melakukan penangkapan ikan di Rumpon tersebut sehingga Rumpon selalu ada armada yang melakukan penangkapan ikan (tidak kosong). Hal ini dilakukan untuk menjaga rumpon agar tidak dimanfaatkan oleh nelayan lain atau diputus oleh kapal ikan besar.

Menurut Pak Sutopo, jika dilihat dari API dan ABPI maka nelayan asli di Pancer terbagi menjadi 2 golongan yaitu nelayan Rumpon (*rumpungan*) dan nelayan yang menggunakan pancing dan rawai dasar. Sehingga produksi perikanan tangkap di Pancer sangat dipengaruhi oleh perikanan Rumpon

(*rumpungan*). Karena dengan Rumpon ini tidak mengenal musim ikan dan dapat melakukan penangkapan ikan sepanjang tahun yang mana akan mempunyai pengaruh yang besar pada produksi ikan hasil penangkapan ikan di TPI Pancer. Saat musim lemuru di perairan Pancer dan sekitarnya pada bulan Mei - November, biasanya ada puluhan armada slerek dengan API *Purse Seine* yang berasal dari Muncar melakukan penangkapan ikan dan bersandar di PP. Pancer. Dengan ramainya aktivitas perikanan tangkap di PP. Pancer ini, sampai saat ini Nelayan Rumpon tidak pernah bergesekan atau ada konflik dengan nelayan slerek dari Muncar dan nelayan lain yang berasal dari Pancer sendiri karena areal tangkapnya yang berbeda dimana nelayan lain menangkap ikan di bawah 15 mil sedangkan nelayan rumpon diatas 25 mil dari pantai pancer. Tetapi masih ada gesekan atau konflik antara nelayan Rumpon (*rumpungan*) Pancer dengan nelayan Rumpon yang berasal dari Pekalongan dan Cilacap dengan armada besar (> 30 GT) yang menggunakan API *Trawl*. Konflik ini diakibatkan nelayan Pekalongan dan Cilacap ini menempatkan Rumpon berdekatan dengan rumpon milik nelayan Pancer yaitu di area 40 – 45 mil. Padahal sebelumnya penempatan rumpon milik nelayan Pekalongan dan Cilacap ini di atas 60 mil. Armada-armada ini melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjungwangi, Ketapang. Konflik juga pernah terjadi dengan nelayan Rumpon dari Puger karena nelayan Rumpon pancer dianggap menempatkan Rumponnya di perairan lepas pantai Puger. Sehingga untuk menghindari konflik berkelanjutan maka saat ini nelayan Pancer menempatkan Rumponnya agak ke timur agar tidak *overlap* dengan Rumpon milik nelayan Puger.

Menurut Pak Sutopo, nelayan Rumpon (*rumpungan*) mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dari pada nelayan lain itu yang salah satunya tercermin dari keberhasilan Pak Sutopo yang saat ini mempunyai usaha sampingan berupa penjualan *jukung speed* yang didatangkan dari Cilacap. Selain itu, jika nelayan Rumpon mempunyai hutang kepada pengambek biasanya hanya berupa ikatan agar pengambek tetap bisa mendapatkan ikan dari nelayan. Pengambek tidak mau hutang ini dibayar oleh nelayan Rumpon (*rumpungan*) sehingga tidak dipotongkan dari hasil penjualan ikan nelayan.

4. MISDI

Mulai tahun 1989 saat berumur 15 tahun, Pak Misdi bekerja sebagai nelayan ABK pada armada jaring payang milik Faushin selama 4 tahun sampai tahun 1993. Tahun 1993 sampai tahun 2002 ikut pada armada dengan API *Gill Net* (jaring insang) milik Faushin yang selanjutnya dipercaya sebagai Juragan Laut (Nahkoda) mulai tahun 1997. Kemudian pada tahun 2001, Pak Misdi beralih menjadi nelayan Rumpon (*rumpungan*) sebagai nahkoda dari sekoci milik Juragan Darat Pak Puji Purwanto. Sedangkan ikan hasil penangkapannya dijual kepada *pengambek* H. Sulaeman.

Menurut Pak Misdi, perikanan Rumpon (*rumpungan*) muncul di Pancer pada tahun 1999. Rumpon pertama ini adalah bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi kepada nelayan Pancer sebanyak 3 unit. Pemberian bantuan ini didapatkan oleh nelayan Pancer setelah nelayan Rumpon Bugis pergi karena di demo nelayan Pancer. Rumpon ini dapat dimanfaatkan semua nelayan di pancer yang mau sehingga banyak armada pancer yang memanfaatkannya. Karena semua nelayan pancer diperbolehkan menangkap ikan di sekitar Rumpon dan tidak ada yang bertanggung jawab untuk merawat sehingga tidak sampai setahun Rumpon putus.

Pada tahun 2002, H. Sulaeman sebagai *pengambek* meluncurkan Rumpon yang dimanfaatkan oleh 7 armada/sekoci yang menjadi *ambekan* dari H. Sulaeman. Sehingga semua ikan hasil tangkapan 7 armada tersebut disetor dan dibeli oleh H. Sulaeman dengan harga yang ditentukan dan selisih 20-50% lebih rendah dari harga ikan di daerah lain. Selain itu biaya pembuatan Rumpon merupakan hutang yang ditanggung ke 7 armada/sekoci yang akan dipotongkan dari hasil penjualan ikan nelayan. Pak Misdi bekerja sebagai nahkoda sekoci milik Pak Puji Purwanto dengan *pengambek* H. Sulaeman sampai tahun 2007. Pada tahun 2007 P. Misdi pindah menjadi nahkoda sekoci *rumpungan* milik Mbah Udin selama 1 tahun. Karena merasa cukup berpengalaman, selanjutnya pada tahun 2008, Pak Misdi memberanikan diri membeli sekoci dengan cara hutang. Mulai tahun 2008 itu Pak Misdi ikut membuat Rumpon secara berkelompok dengan nelayan Rumpon lainnya sebanyak 5-6 armada/sekoci. Karena dengan

berkelompok biaya pembuatan Rumpon akan lebih ringan karena ditanggung bersama..

Aturan main dari kelompok nelayan rumpon ini adalah sebagai berikut:

- Rumpon adalah aset kelompok
- Armada/Sekoci yang boleh menangkap ikan di Rumpon adalah armada yang mempunyai andil berupa urunan (iuran) untuk pembuatan Rumpon
- Armada/Sekoci lain yang tidak ikut iuran tidak diperbolehkan melakukan *kentil* (menambatkan armada/sekoci karena dapat mengurangi usia pakai Rumpon/putus) dan menangkap ikan di Rumpon (walau masih ada hubungan saudara)
- Iuran dibayarkan oleh anggota kelompok nelayan rumpon sebelum peluncuran (karena ada resiko hilang, putus dan sedikit ikan setelah rumpon diluncurkan)
- Semua armada/sekoci anggota kelompok nelayan rumpon mempunyai kewajiban untuk melakukan perawatan secara bersama-sama
- Semua armada/sekoci anggota kelompok nelayan rumpon harus mau diatur bergiliran saat melakukan penangkapan ikan di Rumpon tersebut sehingga Rumpon selalu ada armada yang melakukan penangkapan ikan (tidak kosong). Hal ini dilakukan untuk menjaga rumpon agar tidak dimanfaatkan oleh nelayan lain atau diputus oleh kapal ikan besar.

Dan dari kerjakerasnya, Pak Misdi sekarang mempunyai 4 armada/sekoci yang salah satunya di Nahkodai sendiri. Selain itu Pak Misdi juga bertindak sebagai bakul atau pembeli ikan dari ke 4 armadanya. Menurut Pak Misdi, pengambek dan bakul ikan di Pancer saat ini tidak dapat membeli ikan dengan harga seenaknya, karena nelayan tidak akan mau menjual ke pengambek dan bakul ikan tersebut. Akibatnya pengambek dan bakul ikan tersebut tidak mendapatkan ikan lagi dari nelayan. Untuk menjaga hubungan antara dirinya sebagai Juragan Darat, Bakul yang merangkap Nahkoda dengan ABK dan Nahkoda di 3 sekoci lain miliknya maka Pak Misdi menerapkan sistem

musyawarah dalam penentuan harga ikan, biaya pembuatan Rumpon dan uang saku ABK. Hal ini dilakukan agar Nahkoda dan ABK tersebut tidak berhenti bekerja dari sekoci miliknya. Juragan Darat tidak dapat bertindak semena-mena karena mencari tenaga Nahkoda dan ABK untuk armada/sekoci *rumpungan* tidak mudah, karena tidak semua nelayan terbiasa mencari ikan selama 5-7 hari/tripnya, sehingga Juragan Darat akan berusaha menghindari pergantian Nahkoda dan ABK karena jika pengganti ABK tidak berpengalaman akan butuh waktu untuk belajar dan pembiasaan sebagai nelayan *rumpungan*. Saat Pak Misdi akan melakukan pemotongan dari hasil penjualan ikan dari ke 4 sekocinya, maka harus sepengetahuan dan persetujuan Nahkoda dan ABK. Jika Nahkoda dan ABK meminta tidak melakukan pemotongan saat itu (misalnya untuk pembayaran biaya pembuatan Rumpon) maka Pak Misdi akan menundanya. Biaya pembuatan Rumpon akan dijadikan hutang dan dibagi rata pada ke 4 armada/sekoci miliknya. Tetapi jika Rumpon itu putus maka hutang akan dianggap lunas sehingga pemotongan dan angsuran biaya pembuatan Rumpon akan dihentikan.

Menurut Pak Misdi kelompok nelayan yang pertama kali membuat rumpon sendiri di ketuai oleh Bapak Husni pada tahun 2008. Dia mengajak 5 sekoci lain untuk urunan pembuatan rumpon. Selain itu perikanan Rumpon (*rumpungan*) ini sangat cocok di gunakan di daerah Pancer dan sekitarnya yang merupakan perikanan lepas pantai (*off shore*). Produksi perikanan tangkap di Pancer juga sangat dipengaruhi oleh perikanan Rumpon (*rumpungan*) ini. Karena dengan Rumpon ini tidak mengenal musim ikan dan dapat melakukan penangkapan ikan sepanjang tahun yang mana akan mempunyai pengaruh yang besar pada produksi ikan hasil penangkapan ikan di TPI Pancer. Saat musim lemuru di perairan Pancer dan sekitarnya pada bulan Mei - November, biasanya ada puluhan armada slerek dengan API *Purse Seine* yang berasal dari Muncar melakukan penangkapan ikan dan bersandar di PP. Pancer. Dengan ramainya aktivitas perikanan tangkap di PP. Pancer ini, sampai saat ini Nelayan Rumpon tidak pernah bergesekan atau ada konflik dengan nelayan slerek dari Muncar dan nelayan lain yang berasal dari Pancer sendiri karena areal tangkapnya yang berbeda dimana nelayan lain menangkap ikan di bawah 15 mil sedangkan nelayan rumpon diatas 25 mil dari

pantai pancer. Menurut Pak Misdi, saat slerek Muncar banyak yang datang ke Pancer, yang dirasakan mengganggu bagi nelayan Pancer adalah tidak luasnya nelayan Pancer khususnya nelayan Rumpon ketika melakukan aktivitas bongkar muat dan bersandar di PP. Pancer. Karena daya tampung kolam labuh PP. Pancer kurang memadai saat slerek Muncar datang dalam jumlah puluhan. Tetapi mulai tahun 2016 ini ada pembangunan sarana dan prasarana di PP. Pancer termasuk memperluas kolam labuh sehingga dapat menampung lebih banyak armada dan mempermudah proses bongkar muatnya.

Menurut Pak Misdi, usaha perikanan Rumpon (*rumpungan*) adalah usaha yang menjanjikan dan nelayan Rumpon (*rumpungan*) mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dari pada nelayan lain itu yang salah satunya tercermin dari keberhasilan Pak Misdi yang merintis usaha dari nelayan ABK sampai saat ini mempunyai 4 sekoci *rumpungan* dan juga menjadi bakul ikan. Ikan tuna kualitas ekspor ia kirim ke Benoa Bali. Sedangkan untuk pendapatan rata-rata ABK yang bekerja di sekoci miliknya (12 orang) sebesar Rp. 2.500.000,- dan Nahkoda (3 orang) sebesar Rp. 5.000.000,- tiap *padangan*.

5. MADURI



Pak Maduri pertama kali pindah ke Dusun Pancer Desa Sumberagung pada tahun 2006 dan bekerja sebagai nelayan ABK pada armada API *Gill Net* (jaring insang) milik Mbah Udin sampai tahun 2007. Kemudian pada akhir tahun 2007 sampai 2011 pindah kerja (*boro*) ke Sendang Biru, Malang sebagai ABK pada

armada/sekoci *rumpungan* (Rumpon). Dari hasil yang dikumpulkan saat bekerja di Sendang Biru, Malang ini, pada tahun 2012 kembali ke Pancer dan membeli sekoci seharga Rp. 135.000.000,-. Pak Maduri menjadi Nahkoda di sekoci miliknya dan mempunyai 4 orang ABK. Selanjutnya Pak Maduri bergabung dengan kelompok Pak Sujarno untuk pemanfaatan Rumpon sampai sekarang. Saat bergabung dengan kelompok Pak Sujarno ini, Pak Maduri dan anggota lainnya pernah memiliki dan memanfaatkan 3 unit Rumpon. Tetapi sekarang Rumpon kelompok tinggal 1 unit, karena 2 unit Rumpon lainnya putus pada bulan Desember 2015 yang lalu. Kelompok ini berencana meluncurkan 1 unit Rumpon lagi pada bulan Juli 2016 untuk menambah jumlah Rumpon kelompok agar ikan hasil tangkapan lebih melimpah. Untuk pembagian hasil dari penangkapan ikan yang dibagikan tiap 3/trip adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah	Bagian
Juragan Darat (Pemilik Sekoci)	1	4 bagian
Juragan Laut (Nahkoda)	1	2 bagian
ABK (Anak Buah Kapal)	4	4 bagian

Karena Pak Maduri sebagai pemilik sekoci yang merangkap Nahkoda maka dia mendapat 6 bagian, sedangkan masing-masing ABK mendapat 1 bagian.

Dari pengalamannya, menurut Pak Maduri perikanan Rumpon (*rumpungan*) ini sangat sesuai untuk perikanan lepas pantai (*off shore*) seperti di daerah Pancer dan sekitarnya. Nelayan Pancer lebih suka bekerja menjadi ABK pada armada/sekoci Rumpon karena ada kejelasan pendapatan. Selain mendapat bagi hasil dari penjualan ikan, ABK dan Nahkoda akan mendapatkan uang makan berkisar Rp. 250.000 – Rp. 300.000 / trip. Selain itu ada kejelasan untuk lokasi penangkapan ikan (Rumpon) sehingga tidak perlu menangkap ikan dengan cara berburu di luasnya samudera. Hal ini akan menghemat biaya operasional. Untuk mencari lokasi Rumpon yang di miliki kelompok, maka setiap armada/sekoci menggunakan GPS.

Selama tahun 2006 – 2012, Nelayan Rumpon tidak pernah bergesekan atau ada konflik dengan nelayan slerek dari Muncar dan nelayan lain yang berasal dari Pancer sendiri karena areal tangkapnya yang berbeda dimana nelayan lain

menangkap ikan di bawah 15 mil sedangkan nelayan rumpon diatas 25 mil dari pantai pancer. Tetapi masih ada konflik antara nelayan Rumpon (*rumpungan*) Pancer dengan Kapal *Long Line* yang berasal dari Benoa, Bali. Konflik ini terjadi karena lokasi penangkapan ikan dari Kapal *Long Line* kadang kadang mendekati area penempatan rumpon milik nelayan Pancer. Sehingga jika API Long Line ini terbelit pada rumpon milik kelompok nelayan Pancer, maka Kapal *Long Line* akan memutus Rumpon tersebut untuk bisa melepas Long Line nya. Menurut Pak Maduri, pemutusan Rumpon oleh Kapal *Long Line* di duga beberapa kali terjadi dan dialami kelompok nelayan Pancer. Jika kelompok nelayan bisa membuktikan kejadian pemutusan (ada saksi, foto dll) maka pihak perusahaan pemilik Kapal Long Line di Benoa Bali akan memberikan ganti rugi kepada kelompok nelayan pemilik Rumpon. Di Pancer, kelompok nelayan yang pernah mendapatkan ganti rugi karena rumponnya diputus ada 3 kelompok, dengan nilai ganti rugi berkisar Rp. 50.000.000 – Rp. 80.000.000 per unit rumpon.

Menurut Pak Maduri, usaha perikanan Rumpon (*rumpungan*) seperti yang dilakukannya adalah usaha yang menjanjikan dan nelayan Rumpon (*rumpungan*) mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dari pada nelayan lain itu yang salah satunya tercermin dari keberhasilan Pak Maduri yang merintis usaha dari nelayan ABK saat ini mempunyai 1 unit sekoci *rumpungan* dan bergabung dengan kelompok nelayan yang diketuai Pak Sujarno. Sedangkan untuk pendapatan rata-rata ABK yang bekerja di sekoci miliknya (4 orang) sebesar Rp. 2.500.000,-. Sedangkan Pak Maduri sebagai Pemilik Kapal merangkap Nahkoda memperoleh pendapatan berkisar Rp. 12.000.000 – Rp. 15.000.000 tiap *padangan*.

6. MATIUS RIYADI, S. TH



Pak Matius Riyadi adalah penduduk asli Pancer yang sehari-hari sebagai pendeta di Gereja Pancer. Tahun 2003 mulai bekerja sebagai karyawan di KUD Mina Tani 45 Pancer. KUD Mina Tani 45 Pancer ini mendapat ijin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi sebagai pengelola TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pancer. Tahun 2005 sampai saat ini dipercaya sebagai sekretaris KUD Mina Tani 45 Pancer.

Saat mulai bekerja pada tahun 2003, sudah ada perikanan rumpon (*rumpungan*) di Pancer. Menurut Pak Matius Rumpon pertama di Pancer adalah Rumpon dengan nama Bobo milik Faushin. Karena melihat hasil dari Rumpon Bobo yang memuaskan, maka nelayan lain tertarik untuk menjadi nelayan *rumpungan*. Tahun 2006 mulai terbentuk kelompok nelayan yang melakukan kerjasama tenaga dan biaya untuk pembuatan dan pemanfaatan rumpon. Awalnya setiap unit rumpon kelompok dimanfaatkan 5-8 unit armada/sekoci, tetapi saat ini setiap rumpon dimanfaatkan oleh 4 armada/sekoci baru.

Dari pengalamannya sebagai karyawan dan pengurus KUD yang mengelola TPI Pancer mengetahui bahwa produksi ikan dari TPI Pancer sangat dipengaruhi oleh perikanan rumpon. Karena jumlah bulan kerja/tahun akan lebih banyak dari pada armada tangkap lain karena perikanan rumpon dalam satu tahun dapat bekerja selama 8 bulan penuh sedangkan 4 bulan bisa bekerja dengan melihat gelombang dan angin.

7. MARGONO



Pada tahun 1987, Pak Margono mulai bekerja sebagai nelayan ABK pada armada jaring payang milik H. Mudhun. Tahun 1995 sampai tahun 2004 ikut pada armada dengan API *Gill Net* (jaring insang) milik H. Mudhun. Kemudian pada tahun 2005, Pak Margono membeli perahu *Kesnol* dengan API *Gill Net Monofilamen* (jaring insang senar) dan sesekali menjadi perahu ojekan untuk mengangkut kebutuhan armada/sekoci *rumpungan* dan Kapal *Purse Seine* saat akan berangkat bekerja, serta mengangkut ikan hasil tangkapan armada/sekoci *rumpungan* dan kapal *Purse Seine* saat berlabuh di PP. Pancer. Tahun 2010, Pak Margono menjual perahu *kesnol* dan membeli Jukung Speed dari bahan *fiberglass*. Jukung Speed (< 3 GT) ini digunakan sebagai armada *rumpungan*, dengan berkelompok bersama 20 jukung Speed lainnya. Rumpon yang dipasang kelompok Jukung Speed ini diletakkan lebih kepinggir sekitar 15 mil dari PP. Pancer. Setiap Jukung Speed ini diawaki 2 orang nelayan.

Dari pengalamannya, menurut Pak Margono perikanan Rumpon (*rumpungan*) ini dapat meningkatkan produksi ikan baik dari nelayan maupun dari kelompoknya. Selain itu ada kejelasan untuk lokasi penangkapan ikan (Rumpon) sehingga tidak perlu menangkap ikan dengan cara berburu di luasnya samudera, hal ini akan menghemat biaya operasional. Untuk mencari lokasi Rumpon yang di miliki kelompok, maka setiap perahu Jukung Speed menggunakan GPS.

Menurut Pak Maduri, usaha perikanan Rumpon (*rumpungan*) seperti yang dilakukannya adalah usaha yang menjanjikan dan nelayan Rumpon (*rumpungan*)

mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dari pada nelayan lain itu yang salah satunya tercermin dari keberhasilan Pak Margono yang merintis usaha dari nelayan ABK saat ini telah mempunyai 8 unit Jukung Speed *rumpungan* dan bergabung dengan kelompok nelayan. Sedangkan untuk pendapatan rata-rata nelayan yang bekerja di Jukung Speed sebesar Rp. 2.500.000,-. Sedangkan Pak Margono sebagai Pemilik 8 Jukung Speed dan merangkap Nahkoda memperoleh pendapatan berkisar Rp. 15.000.000,- tiap *padangan*.

8. SEGER



Pak Seger berasal dari Jember yang semula bekerja sebagai pedagang. Pertama kali pindah ke Dusun Pancer Desa Sumberagung pada tahun 1982 bekerja sebagai pedagang jeruk. Pada tahun 1983 sampai 1990, Pak Seger bekerja sebagai *Manol* (tukang pikul ikan) pada armada payang dan jaringan. Tahun 1990 sampai 1996, Pak Seger berahli pekerjaan sebagai *Pengisi* yang bertugas mengisi kebutuhan armada/kapal yang akan bekerja berupa Es, Sembako, BBM dan kebutuhan lainnya.

Pada tahun 1996, Pak Seger memberanikan diri membeli Perahu *Pakistan* yang dilengkapi API *Gill Net* (Jaring Insang). Pak Seger bekerja sebagai nelayan *Gill Net* ini sampai tahun 2002, kemudian berhenti karena kurang menguntungkan dan banyak hutang di *Pengambek*. Tahun 2002 sampai akhir 2004 Pak Seger tidak bekerja lagi sebagai nelayan. Kemudian tahun 2005 disaat perikanan rumpon di Pancer mulai marak dan menjanjikan, Pak Seger dipercaya saudaranya untuk mengelola Armada/Sekoci *Rumpungan*. Mulai tahun 2009 sampai sekarang Pak

Seger berkelompok dengan Pak Wagini, Pak Iir dan Pak Jahiman untuk mengelola Rumpon Kelompok. Rumpon ini di buat seharga Rp. 45.000.000 dan dimanfaatkan untuk 4 Armada/Sekoci kelompok. Kelompok ini biasanya memiliki dan memanfaatkan 2 unit, tetapi saat ini Rumpon kelompok tinggal 1 unit.

Dari pengalamannya, menurut Pak Margono perikanan Rumpon (*rumpungan*) ini sangat sesuai untuk perikanan lepas pantai (*off shore*) seperti di daerah Pancer dan sekitarnya.. Selain itu ada kejelasan untuk lokasi penangkapan ikan (Rumpon) sehingga tidak perlu menangkap ikan dengan cara berburu di luasnya samudera. Hal ini akan menghemat biaya operasional. Untuk mencari lokasi Rumpon yang di miliki kelompok, maka setiap armada/sekoci menggunakan GPS. Selama tahun 2005 – 2016, Nelayan Rumpon tidak pernah bergesekan atau ada konflik dengan nelayan slrek dari Muncar dan nelayan lain yang berasal dari Pancer sendiri karena areal tangkapnya yang berbeda dimana nelayan lain menangkap ikan di bawah 15 mil sedangkan nelayan rumpon diatas 25 mil dari pantai pancer.

Menurut Pak Seger, usaha perikanan Rumpon (*rumpungan*) seperti yang dilakukannya adalah usaha yang menjanjikan dan nelayan Rumpon (*rumpungan*) mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dari pada nelayan lain itu yang salah satunya tercermin dari keberhasilan Pak Seger yang sebelumnya pernah bangkrut sekarang berhasil mengelola 1 unit sekoci *rumpungan* dan bergabung dengan kelompok nelayan. Sedangkan untuk pendapatan rata-rata ABK yang bekerja di sekoci miliknya (4 orang) sebesar Rp. 2.500.000,-. Sedangkan Pak Seger sebagai Pengelola Armada/Sekoci memperoleh pendapatan berkisar Rp. 5.000.000, sedangkan pemilik Sekoci mendapat Rp. 5.000.000 tiap *padangan*.

9. JAENAH



Sudah 36 tahun Bu Jaenah menjadi istri dari bapak Salamun yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Beberapa macam jenis armada sudah diikuti oleh bapak Salamun sampai saat ini. Menurut Bu Jaenah saat Pak Salamun bekerja sebagai nelayan Payang dan nelayan Gill Net, ekonomi keluarganya serba kekurangan karena pendapatan yang diperoleh Pak Salamun dari hasil melaut yang diserahkan pada Bu Jaenah tidak mencukupi untuk keperluan keluarga sehari-hari. Tapi semenjak menjadi nelayan *Rumpungan* mulai tahun 2000, ekonomi keluarga mulai beranjak meningkat, dimana pendapatan dari hasil melaut Pak Salamun dapat disisihkan dan di tabung oleh Bu Jaenah. Perekonomian keluarga semakin meningkat saat Pak Salamun mempunyai sendiri Armada/Sekoci *Rumpungan* dan berkelompok dalam pemanfaatan Rumpon. Peningkatan ekonomi keluarga ini terlihat dari bentuk bangunan rumah tembok yang lumayan besar serta sudah dilengkapi garasi untuk 1 unit Mobil MPV terbaru yang dibeli Pak Salamun dan Bu Jaenah tahun 2014.

Menurut Bu Jaenah, usaha perikanan Rumpon (*rumpungan*) seperti yang dilakukan Pak Salamun adalah usaha yang menjanjikan dan nelayan Rumpon (*rumpungan*) mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dari pada nelayan lain itu yang salah satunya tercermin dari keberhasilan keluarga Bu Jaenah ini. Hal ini juga tercermin bahwa penghasilan keluarga hanya dari satu sumber yaitu hasil melaut Pak Salamun, sedangkan Bu Jaenah sebagai ibu rumah tangga tidak membantu penghasilan tambahan bagi keluarganya. Walaupun demikian

penghasilan dari Pak Salamun sebagai nelayan *Rumpungan* dirasa cukup untuk memenuhi keperluan keluarga.

10. SUBYAKTO FS, SP

Subyakto FS, SP mulai bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1986. Pernah ditempatkan di TPI Muncar dan Tpi Grajagan sebelum akhirnya ditempatkan sebagai Administratur TPI Pancer mulai tahun 2005 sampai saat ini. Wilayah kerja sebagai Administratur TPI Pancer meliputi semua pendaratan ikan di Kecamatan Pesanggaran diantaranya Lampon, Pulau Merah, Pancer dan Rajegwesi yang semuanya terletak di Pesisir Samudra Indonesia. Selama 11 tahun bekerja sebagai Administratur TPI Pancer memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang karakteristik perikanan tangkap di wilayah kerjanya. Menurut Pak Subyakto FS, produksi perikanan tangkap di wilayah kerjanya mengalami fluktuasi tetapi cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari produksi perikanan tangkap yang fluktuatif ini, yang mempunyai stabilitas tiap tahunnya adalah produksi perikanan tangkap dari nelayan *Rumpungan*. Produksi dari nelayan *Rumpungan* ini sangat tergantung dari jumlah Rumpon yang terpasang dan dimiliki serta dimanfaatkan oleh nelayan di TPI Pancer. Jumlah Restribusi Tempat Pelelangan untuk TPI Pancer (sesuai PERDA No. 5 Tahun 2015, tanggal 25 September 2015) yang dapat dipungut dari nelayan *Rumpungan* (2 %) dan Pedagang/Bakul/Pembeli Ikan (2%) berkisar Rp. 25.000.000,-/tahun. Menurut Pak Subyakto FS, produksi dari nelayan Rumpon (*rumpungan*) sangat menentukan produksi perikanan tangkap di TPI Pancer karena produksinya yang lebih stabil dibanding produksi ikan dari nelayan lainnya.



1.	Unit Kerja	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI
2.	Jabatan	FUNGSIONAL UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI (ADMINISTRATUR TPI PANCER)
3.	Pangkat/Gol. Ruang, TMT	PENATA - III/C - 01/10/2012
4.	Pangkat/Gol. Ruang, TMT CPNS	PENGATUR MUDA - II/A - 01/08/1986
5.	Tempat, Tgl. Lahir	JEMBER - 02/06/1960
6.	Jenis Kelamin	PRIA
7.	Agama	ISLAM
8.	Alamat	DS. KRAJAN RT 02 RW 03 KEDUNGREJO MUNCAR

11. FARID ULAMAK

Seperti kebanyakan pemuda pesisir lainnya, mulai tahun 1997 saat berumur 19 tahun, Farid Ulamak mulai bekerja sebagai nelayan. Pertama kali dia bekerja sebagai pandega (ABK) Jukung. Saat menjadi nelayan jukung, ikan utama yang ditangkap adalah Cumi-Cumi, Cakalan dan Ikan Tuna. API (Alat Penangkapan Ikan) yang digunakan saat itu adalah Pancing. Tahun 2000 mulai bekerja menjadi pandega (ABK) pada armada sekoci *rumpungan* milik Pak Subur yang kemudian diangkat menjadi nahkoda (juragan laut) pada tahun 2001. Pada tahun 2002 pak Farid Ulamak menjadi nahkoda pada sekoci *rumpungan* milik bapak Prayit.

Dari pengalaman sebagai nelayan Rumpon (*Rumpungan*) yang hasilnya menjanjikan, maka pada akhir tahun 2003 Pak Farid Ulamak meyakinkan diri untuk membeli sekoci untuk mencari ikan di rumpon. Pemanfaatan rumpon

dilakukan berkelompok maksimal digunakan oleh 6 sekoci secara bergilir. Saat itu masing-masing sekoci membayar Rp. 5.000.000 untuk biaya iuran pembuatan Rumpon. Biaya pembuatan Rumpon ini pertama ditanggung oleh *Pengambek* (Pembeli Ikan). Biaya ini akan dibagi rata dengan jumlah sekoci yang memanfaatkan Rumpon tersebut dan dianggap hutang nelayan kepada pengambek. Ikan hasil tangkapan di Rumpon tersebut harus disetor nelayan kepada pengambek. Nelayan akan dipotong dari harga ikan sebesar Rp. 1.000/kg dan dipotong lagi untuk angsuran hutang biaya Rumpon. Setelah hutang nelayan untuk pembuatan Rumpon dianggap lunas, maka nelayan bebas menjual ikan hasil tangkapan di Rumpon tersebut kepada *Pengambek* atau *Bakul* lain.

Karena dianggap masih kurang menguntungkan bagi nelayan maka mulai tahun 2008, Pak Farid Ulamak membuat kelompok sendiri untuk pembuatan Rumpon Laut Dalam. Rumpon ini langsung dibiayai oleh urunan (iuran) dari Kelompok Nelayan ini. Satu kelompok nelayan yang memanfaatkan Rumpon terdiri dari 4 sekoci. Satu sekoci biasanya mempunyai saham di 2 unit Rumpon untuk memaksimalkan ikan hasil tangkapan tiap tripnya. Biaya pembuatan Rumpon ini harus sudah dibayarkan *cash* oleh tiap armada/sekoci yang ikut dalam kelompok sebelum Rumpon diluncurkan. Ikan hasil tangkapan di Rumpon tersebut bebas dijual oleh masing-masing armada/sekoci ke pengambek, bakul atau pembeli lainnya. Karena hasil ikan yang menjanjikan maka nelayan rumpon mempunyai *bargaining power* kepada pengambek walaupun punya hutang. Karena pengambek tidak mau nelayan rumpon membayar hutangnya dan beralih ke orang lain.

Menurut Pak Farid Ulamak, menjadi nelayan rumpungan lebih menjanjikan disebabkan antara lain:

- a. Ikan target (Tuna, Cakalan, Lemadang dll) selalu ada di Rumpon, sehingga setiap kali bekerja, nelayan dapat dipastikan akan membawah ikan hasil tangkapan dari rumpon. Hal ini membuat nelayan lebih senang menjadi nahkoda dan pandega di sekoci rumpon, karena kebutuhan ekonomi keluarga lebih mudah dipenuhi (kenyamanan ekonomi).

- b. Musim penangkapan ikan dengan ABPI Rumpon lebih panjang dari pada nelayan lain karena dapat melakukan penangkapan ikan sepanjang tahun. Sedangkan seperti nelayan lainnya di laut selatan Jawa maka musim penangkapan ikan biasanya berlangsung selama 8 bulan.
- c. Area / tempat penangkapan ikan tetap dan tidak berubah. Nelayan rumpungan tidak perlu berburu untuk menangkap ikan sehingga biaya BBM dapat dihemat oleh nelayan. Nelayan hanya memerlukan GPS untuk mencari rumpon yang ditempatkan.

Menurut Pak Farid Ulamak, nelayan Rumpon (*rumpungan*) mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dari pada nelayan lain. Untuk setiap trip penangkapan ikan, pandega (ABK) di sekoci rumpon mendapat uang makan berkisar Rp. 150.000 sampai Rp. 250.000. Selain itu pandega (ABK) mendapat “*Mer Kemer*” berupa ikan yang biasanya dijual kepada bakul. Sehingga nelayan yang menjadi pandega (ABK) di sekoci rumpungan akan mendapatkan penghasilan berkisar Rp. 400.000- Rp. 550.000/trip (4 trip/bulan). Saat *padangan*, pandega (ABK) akan mendapat tambahan penghasilan dari pembagian hasil bersih penangkapan ikan selama 1 bulan. Pembagian hasil bersih selama 1 bulan diatur sebagai berikut:

Nama	Jumlah	Bagian
Juragan Darat (Pemilik Sekoci)	1	4 bagian
Juragan Laut (Nahkoda)	1	2 bagian
ABK (Anak Buah Kapal)	4	4 bagian

12. RIKA MULYANI

Rika Mulyani adalah istri dari bapak Farid Ulamak dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama dari pasangan ini duduk di kelas 8 (SMP) sedangkan anak kedua menempuh pendidikan di SD kelas 5 dan anak terakhir belum bersekolah. Sehari-hari bu Rika Mulyani bekerja sebagai *bakul* ikan yang menjual ikan hasil kerja suami maupun pembelian dari sekoci rumpungan lainnya yang mendarat di PP. Pancer.

Pada tahun 1999 – 2000, saat menjadi istri bapak Farid Ulamak yang masih bekerja sebagai nelayan *jukungan*, kondisi ekonomi keluarga masih pas-pasan. Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa bisa menyisihkan untuk menabung. Tapi saat bekerja sebagai nelayan *rumpungan* (tahun 2000) kondisi ekonomi mulai membaik dan akhirnya pada tahun 2003 mereka memberanikan diri untuk membeli armada sekoci untuk *ngrumpung*. Saat ini kondisi ekonomi keluarga sudah berkecukupan, hal ini terlihat dari bentuk bangunan rumah serta kepemilikan 2 unit mobil (1 unit pick up dan 1 unit MPV terbaru).

Menurut Rika Mulyani ada suka dan duka menjadi istri nelayan *rumpungan*. Jika diukur dari perekonomian keluarga, maka sebagai nelayan *rumpungan* sangat menjanjikan secara ekonomi karena dapat dipastikan akan mendapat penghasilan setiap kali melaut, sehingga perekonomian keluarga tidak pernah kekurangan. Tetapi karena sebagai nelayan *rumpungan* dimana setiap kali melaut perlu waktu 4-5 hari, ada rasa khawatir setiap kali ditinggal melaut. Apalagi saat suami melaut selama 4-5 hari, tidak ada komunikasi diantara mereka berdua karena jauhnya lokasi penangkapan ikan sehingga tidak bisa di akses alat komunikasi. Selain itu, bu Rika Mulyani harus bisa mengurus semua keperluan keluarga dan urusan sosial lainnya saat suami melaut. Sebagai istri bapak Farid Ulamak, sebenarnya mengharapkan suami tidak lagi ikut melaut sebagai Nahkoda dan bekerja saja di darat sebagai bakul ikan dan juragan darat. Tetapi dia tahu suaminya lebih *enjoy* bekerja sebagai Nahkoda di sekoci rumpungan karena sudah terbiasa bekerja sebagai nelayan. Selain itu hanya keahlian sebagai nelayan yang dimiliki suami yang menjadi modal untuk menggerakkan perekonomian keluarga selama 17 tahun pernikahan mereka.

Lampiran 2

DOKUMENTASI

1. RUMPON BANTUAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANYUWANGI dan KELOMPOK NELAYAN PENERIMA
BANTUAN TA. 2015



2. RUMPON SWADAYA KELOMPOK NELAYAN PANCER





3. SOSIALISASI DAN PEMBINAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI KEPADA KELOMPOK NELAYAN







4. DOKUMENTASI WAWANCARA





5. RUMAH NELAYAN INFORMAN



Rumah Bapak Salamun



Rumah Bapak Farid Ulamak